



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	8
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD	30
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.7. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
2.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	35
2.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
2.10. Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	49
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	49
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	58
BAB V PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi*	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Buku Inventaris Semua Klasifikasi Tahun Anggaran 2024	9
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul	12
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul	20
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	34
Tabel 2.6	Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran Dinas Pertanian DIY Tahun 2022-2027	36
Tabel 2.7	Luasan KP2B Per Kapanewon Berdasar Surat keputusan Bupati Gunungkidul nomor 388/KPTS/2021	38
Tabel 2.8	Isu Startegis Perangkat Daerah	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	50
Tabel 3.2	Penentuan Alternatif Strategi.....	53
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra PD.....	54
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra	54
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	56
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	60
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	82
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	104
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan	110
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Pangan	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi	7
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	58

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal itu daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Gunungkidul untuk menyusun Rencana Strategis PD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan sasaran, kebijakan dan program prioritas Dinas Pertanian dan Pangan. Selain itu Renstra ini juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, pada tahun 2026 akan terjadi perubahan kelembagaan OPD di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan ini salah satunya adalah penggabungan Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi satu perangkat daerah baru yang memiliki cakupan tugas dan fungsi yang lebih luas dan terintegrasi.

Penggabungan ini didasarkan pada pertimbangan strategis untuk memperkuat sinergi antar antar bidang dalam sektor pertanian, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta

mendorong efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Dalam struktur baru ini, integrasi program dan kegiatan diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan produktivitas, nilai tambah, serta daya saing sektor pertanian.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun (2025–2029), dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta dinamika perubahan kelembagaan yang terjadi. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pengalokasian sumber daya, dan evaluasi kinerja instansi, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan perangkat daerah mampu menyatukan kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk menjawab tantangan masa depan, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tanggal 5 Nopember 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029 pada urusan pertanian dan pangan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan adalah untuk:

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Perangkat Daerah, antar daerah maupun antar fungsi pemerintah yang strategis selama lima tahun;

2. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
3. Memberikan landasan kebijakan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka mencapai visi dan misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan;
4. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian dan pangan;
5. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
6. Menyediakan tolok banding (*benchmark*) dalam pengukuran kinerja Kepala Dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.7. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

2.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

2.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.10. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi antar sektor. Terhitung mulai tahun 2026, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul; terjadi penggabungan antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul menjadi satu perangkat daerah baru yang memiliki cakupan tugas lebih komprehensif.

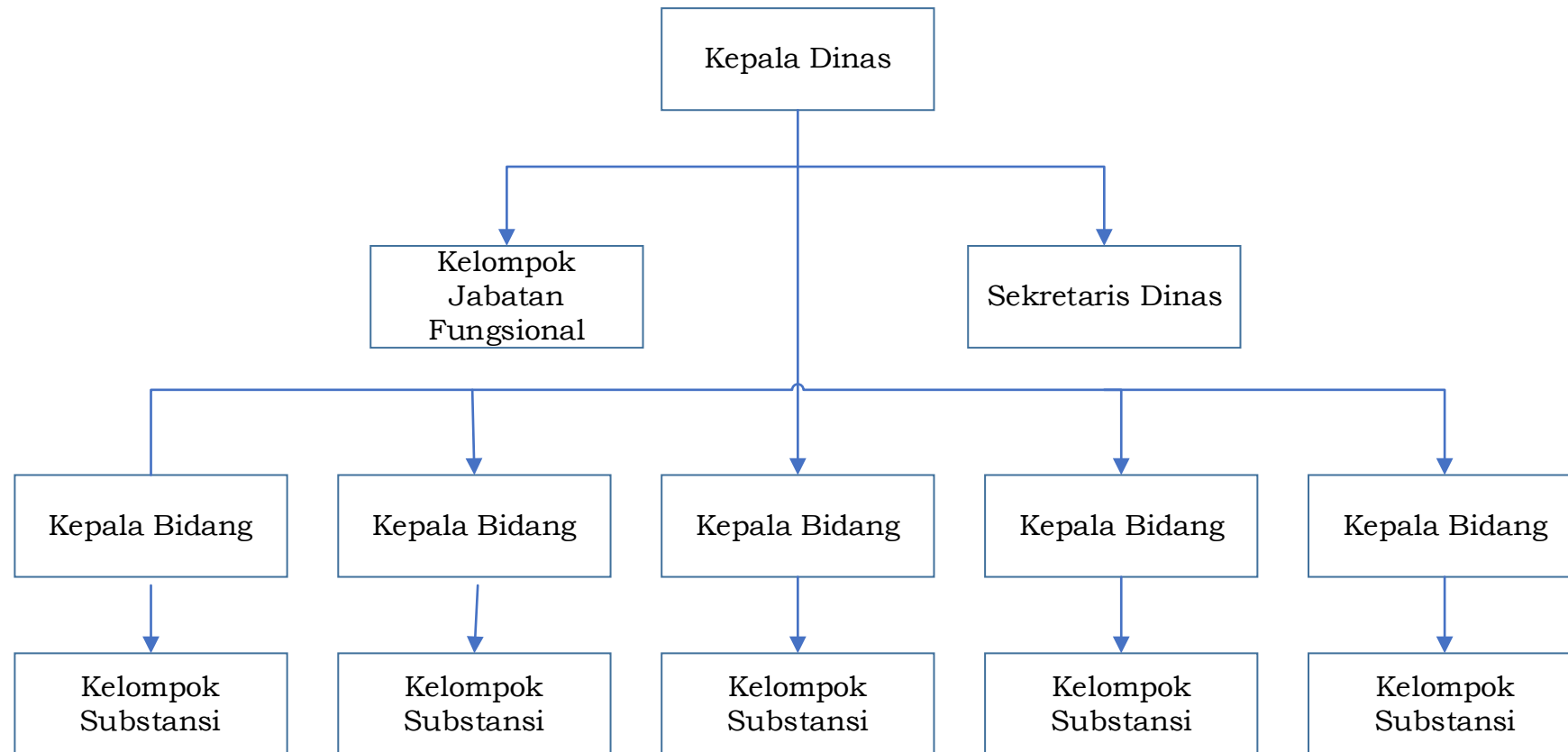
Penggabungan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan sektor pertanian secara terintegrasi, dari hulu ke hilir, yang meliputi aspek budidaya tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, penyuluhan, peternakan, kesehatan hewan, serta ketahanan pangan. Penyatuan kelembagaan ini menuntut adanya penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), struktur organisasi, serta tata kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan.

Bab ini menjabarkan tugas dan fungsi perangkat daerah hasil penggabungan, serta susunan organisasi dan tata kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan program serta kegiatan yang tertuang dalam Renstra, sekaligus memastikan adanya kesinambungan dan keselarasan antara visi daerah dan pelaksanaan teknis operasional di lapangan. Penjabaran terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat daerah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pertanian, pangan, peternakan, dan kesehatan hewan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan, peternakan, dan kesehatan hewan;
 - c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pertanian, pangan, peternakan, dan kesehatan hewan;
 - d. Pembinaan di bidang pertanian, pangan, dan pelaksanaan pembinaan budi daya di bidang peternakan;
 - e. Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;

- f. Pembinaan dan fasilitasi pasca panen, pengolahan, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- g. Pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- h. Pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang pertanian dan pangan;
- i. Penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pangan, peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Pelaksanaan perlindungan tanaman serta pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit hewan;
- k. Pembinaan perbibitan dan perbenihan pertanian serta pengelolaan perbibitan ternak;
- l. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman;
- m. Pengawasan standar mutu alat, mesin, pupuk, dan pestisida pertanian;
- n. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- o. Pengoordiansian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketahanan pangan;
- p. Pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
- q. Pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian, pangan, dan peternakan;
- r. Pengelolaan sistem informasi penyuluhan pertanian dan pangan serta penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang peternakan;
- s. Pengembangan kerja sama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan pangan;
- t. Pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan urusan kesejahteraan hewan;
- u. Pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang peternakan;
- v. Pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
- w. Pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- x. Pengelolaan pengolahan pakan ternak;
- y. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- z. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pertanian, pangan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- aa. Penyusunan dan penerapan serta pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, dan kesehatan hewan.
- bb. Pengelolaan UPT;
- cc. Pengelolaan kesekretariatan Dinas;

Gambar 2.1. Struktur Organisasi



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Penggabungan Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ke dalam satu perangkat daerah baru membawa implikasi langsung terhadap pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia (pegawai) maupun aset yang dimiliki. Penataan kembali sumber daya ini menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Sumber daya aparatur merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan pegawai harus memperhatikan aspek kompetensi, pengalaman, serta proporsionalitas distribusi sesuai kebutuhan unit kerja baru hasil penggabungan. Harmonisasi antar pegawai dari dua dinas sebelumnya juga menjadi perhatian penting untuk menjaga soliditas, profesionalisme, dan budaya kerja yang kondusif.

Tahun 2024, Dinas Pertanian dan Pangan dengan 4 bidang, 1 sekretariat, 2 UPT dan 18 BPP, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung sumberdaya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 135 orang per Desember Tahun 2024. Sedangkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan 3 bidang, 1 sekretariat dan 11 UPT, didukung sumberdata manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 67 orang. Sebagai Perangkat Daerah baru, jumlah pegawai yang ada seperti pada tabel 2.1. di bawah ini

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan,
Jenis Kelamin dan Kompetensi*

No	Jabatan	Pegawai yang ada						Laki-laki	Perempuan
		Jumlah	Kualifikasi						
			S2	S1	D3	SMA	SMP		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1
B	Jabatan Administrasi								
	Administrator	7	4	3				4	3
	Pengawas	21	7	13	1			11	10
	Pelaksana	29		12	3	13	1	18	11
C	Jabatan Fungsional	144	19	77	25	23		78	66
	Jumlah	202	31	105	29	36	1	112	90

*sementara

Selain itu, penggabungan perangkat daerah juga berdampak pada konsolidasi aset, termasuk tanah, bangunan, kendaraan operasional, peralatan, dan sarana-prasarana pendukung lainnya. Penyesuaian dan inventarisasi aset secara akurat sangat diperlukan agar tidak terjadi duplikasi, kehilangan fungsi, maupun inefisiensi dalam penggunaannya. Aset yang dimiliki harus mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis, baik di bidang pertanian, peternakan, kesehatan hewan, maupun ketahanan pangan.

Dalam bagian ini akan disampaikan kondisi eksisting aset yang dimiliki dari Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebelum penggabungan, sebagai dasar dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan untuk periode 2025–2029. Pengelolaan sumber daya yang terarah dan terintegrasi

diharapkan dapat memperkuat kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut adalah Rekapitulasi Buku Inventaris Per Sub yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Buku Inventaris
Semua Klasifikasi Tahun Anggaran 2024

No	Nama Barang	Saldo Akhir	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
A. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
1	Aset	3.687	42.442.695.674,08
2	Aset Tetap	3.422	40.734.655.176,67
3	Tanah	8	1.496.267.000,00
4	Tanah	8	1.496.267.000,00
5	Peralatan Dan Mesin	3.016	12.304.415.166,21
6	Alat Besar	31	133.896.500,00
7	Alat Angkutan	164	3.278.235.951,33
8	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	65	368.214.357,16
9	Alat Pertanian	135	1.484.167.366,00
10	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.137	3.516.250.231,72
11	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	133	527.297.713,00
12	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1	35.640.000,00
13	Alat Laboratorium	67	337.890.019,00
14	Alat Persenjataan	0	0
15	Komputer	283	2.622.823.028,00
16	Alat Eksplorasi	0	0
17	Alat Pengeboran	0	0
18	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	0
19	Alat Bantu Eksplorasi	0	0
20	Alat Keselamatan Kerja	0	0
21	Alat Peraga	0	0
22	Peralatan Proses/Produksi	0	0
23	Rambu - Rambu	0	0
24	Peralatan Olah Raga	0	0
25	Gedung Dan Bangunan	165	24.564.860.144,33
26	Bangunan Gedung	128	21.182.580.110,33
27	Monumen	0	0
28	Bangunan Menara	1	10.822.500,00

No	Nama Barang	Saldo Akhir	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
29	Tugu Titik Kontrol/Pasti	36	3.371.457.534,00
30	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	35	2.150.496.508,63
31	Jalan Dan Jembatan	5	690.993.625,43
32	Bangunan Air	15	1.285.530.368,70
33	Instalasi	4	6.296.522,00
34	Jaringan	11	167.675.992,50
35	Aset Tetap Lainnya	198	218.616.357,50
36	Bahan Perpustakaan	1	156.100,00
37	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	0	0
38	Hewan	55	190.850.000,00
39	Biota Perairan	0	0
40	Tanaman	142	27.610.257,50
41	Barang Koleksi Non Budaya	0	0
42	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
45	Aset Lainnya	265	1.708.040.497,41
46	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
47	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
48	Aset Tidak Berwujud	14	843.906.000,00
49	Aset Tidak Berwujud	14	843.906.000,00
50	Aset Lain-Lain	251	864.134.497,41
51	Aset Lain-Lain	251	864.134.497,41
JUMLAH		3.687	42.442.695.674,08
B. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
1	Tanah		82.000.000,00
2	Alat Angkutan		2.050.926.141,08
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur		257.323.601,00
4	Alat Pertanian		103.543.500,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga		1.338.376.074,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		270.984.450,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan		409.164.500,00

No	Nama Barang	Saldo Akhir	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
8	Alat Laboratorium		1.008.708.115,00
9	Komputer		806.179.249,00
10	Peralatan Proses/Produksi		47.286.000,00
11	Bangunan Gedung		8.375.892.867,33
12	Tugu Titik Kontrol/Pasti		509.345.200,00
13	Jalan dan Jembatan		17.915.000,00
14	Bangunan Air		18.763.000,00
15	Instalasi		397.745.000,00
16	Jaringan		5.243.200,00
17	Aset tak berwujud		79.580.000,00
18	Aset Lain-lain		63.226.812,00
JUMLAH			18.842.202.709,41
TOTAL		3.687	61.284.898.383,49

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah penggabungan antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai tahun 2026, pelayanan yang semula tersebar di dua perangkat daerah kini dikelola secara terintegrasi oleh satu institusi baru. Hal ini membawa dampak terhadap efektivitas, efisiensi, dan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, kinerja pelayanan pra-penggabungan menunjukkan realisasi capaian tinggi. Diharapkan dengan penggabungan terjadi peningkatan dari sisi koordinasi lintas bidang, pemanfaatan sumber daya secara bersama, serta penyederhanaan proses layanan. Pelayanan kepada petani, peternak, dan pelaku usaha pangan dapat dilakukan secara lebih terpadu, baik dalam hal penyuluhan, bantuan sarana produksi, perlindungan tanaman dan ternak, pengawasan kesehatan hewan, hingga distribusi dan pengawasan pangan.

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran. Kinerja pelayanan perangkat daerah untuk tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini yang merupakan gambaran kinerja dari Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Bidang Penyuluhan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Bina Produksi Peternakan dan Bidang Sarana Prasarana Peternakan. Hasil. Gambaran capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat											
	Produksi Tanaman Pangan	1.519.824	1.550.220	1581224,8	1.612.849	1.645.106	1.585.700,01	1516969,88	1.184.277,54	104,33	97,86	74,90
	Produksi Perkebunan dan Hortikultura	33.842,34	33.949,10	34056,68	37.400,00	34.272,84	24.814,92	40314,73	34303,13	73,33	118,75	100,72
2	Ketahanan Pangan meningkat											
	Capaian Skor PPH Konsumsi	89,8	89,9	90	90,1	90,2	91,3	93,01	91,4	92,80	102,30	101,51
3	Produksi Peternakan Meningkatkan											
	Produksi Daging	3.594,20	3.596,17	3.598,15	3.600,15	3.602,15	6.942,07	9.145,67	8.580,48	193,15	254,32	238,47
	Produksi Telur	3.594,20	3.596,17	3.598,15	3.589,76	3.590	6.143,34	6.085,89	8.391,38	170,92	169,23	233,21
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan											

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Jumlah Ternak yang dilayani di fasilitas kesehatan hewan	3.143	3.286	3.486	3.500	3.600	4.607	8.706	13.879	146,58	264,94	398,14
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD											
	Nilai AKIP DPP	A (80,10)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	80,10	80,9	81,33	100,00	100,87	101,28
	Nilai AKIP DPKH	A (80,10)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	80,10	80,9	81,06	100,00	100,87	101

Tabel 2.3 di atas menunjukkan tentang pencapaian kinerja pelayanan RPJMD Dinas Pertanian Dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2024. Evaluasi Kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, dan membandingkan kinerja dengan tahun sebelumnya dan dengan target di akhir Renstra. Adapun hasil analisa capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Meningkatkan. Produksi tanaman pangan diukur melalui angka komulatif produksi laporan statistik tanaman pangan tahun ke-n meliputi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Produksi hortikultura dan perkebunan diukur melalui angka komulatif produksi laporan statistik perkebunan dan hortikultura pada tahun ke-n meliputi kakao, mete, tembakau, kelapa, cabe, bawang merah, pisang, alpukat, dan durian.

Realisasi kinerja tanaman pangan 1.184.277,54 ton pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2023 (1.516.969,88 ton). Sedangkan pada tanaman perkebunan dan hortikultura realisasi di tahun 2024 (37.303,13) mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2023 (40.314,73 ton) tetapi capaiannya melebihi target di tahun 2024 (34.315,5 ton).

Penurunan produksi tanaman pangan sebesar -39.647,24 ton. Produksi padi di Gunungkidul tahun 2024 ada penurunan dibanding produksi padi tahun 2023 dikarenakan ada dampak perubahan iklim yaitu fenomena El Nino atau kekeringan di 2024. Kondisi el nino 2024 ditandai hujan terlambat dan berakhir lebih cepat atau kekeringan sehingga produksi padi tidak optimal. Meski demikian jumlah produksi padi ini jika dikonversi ke beras masih melebihi kebutuhan beras penduduk Gunungkidul atau tetap masih surplus dibanding kebutuhan berasnya. Harapannya tahun 2025 dengan curah hujan yang bagus dapat memberikan produksi padi optimal sehingga produksi padi setara tahun-tahun sebelumnya berkisar di angka 300.000 ton GKG setahunnya. Sedangkan produksi jagung meningkat di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Hal ini antara lain karena dampak el nino hujan terlambat datang menyebabkan petani beralih dari menanam padi ke menanam jagung sehingga luas tanam jagung bertambah.

Komoditas padi capaian target produksinya didukung oleh padi sawah dan padi ladang. Produktivitas dari padi ladang banyak ditentukan oleh intensitas curah hujan. Sepanjang Tahun 2024 hari hujan rata-rata sebesar 9 hari dengan curah hujan rata-rata sebesar 160.99 mm. Penurunan produksi dipengaruhi karena Musim tanam I pada bulan Oktober-November 2023 hampir semua kapanewon mempunyai rata-rata curah hujan sangat rendah 80.93 mm. Sehingga selama tahun 2024 penanaman padi tidak dilaksanakan seperti biasanya sehingga produksi gabah menurun dan tidak mencapai target yang ditetapkan.

Luas areal tanam jagung 80.314 ha lebih tinggi dari tahun 2023 (55.209 ha) disebabkan karena dampak el nino dimana hujan terlambat datang menyebabkan petani beralih dari menanam padi ke menanam jagung sehingga luas tanam jagung bertambah. Kegiatan penguatan perlindungan tanaman jagung juga dilakukan dengan gerakan pengendalian OPT. Penanganan pascapanen jagung juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil dan penurunan susut.

Penurunan produksi dari ubi kayu terlihat pada luas panen. Tahun 2024 dengan rata-rata tingkat curah hujan menengah 160,99 mm (antara 100-300 mm) juga mempengaruhi jumlah kadar pati dalam ubi kayu, sehingga tidak tercapai berat maksimal. Rata-rata pertumbuhan produksi ubi kayu dari tahun ke tahun tercatat cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir (-39,13%). Produksi ubi kayu tahun 2024 menurun -301.494 ton bila dibandingkan tahun 2023 (927.159 ton) dengan capaian ada di 625.665 ton.

Capaian kinerja untuk indikator produksi tanaman perkebunan dan meningkat sebesar 2.987,63 ton dari realisasi tahun 2023 sebesar 34.315,50 ton menjadi 37.303,13 ton di tahun 2024. Komoditas perkebunan realisasi di tahun 2024 untuk komoditas tembakau, kakao dan mete mengalami peningkatan jumlah produksi. Hanya komoditas kelapa yang mengalami penurunan produksi 1.570 ton dari hasil kelapa di tahun 2023 sebesar 27.724.777 butir menurun menjadi 21.441.579 butir di tahun 2024.

Meningkatnya produksi pada komoditas perkebunan antara lain disebabkan oleh adanya harga yang menarik, jaminan harga dan kepastian pasar sehingga mendorong petani memelihara tanamannya dengan baik. Selain itu peningkatan produksi dipengaruhi oleh meningkatnya luas areal tanam, penggunaan bibit/ benih bervariasi unggul, adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi, perluasan areal, pemberdayaan petani, pemeliharaan kebun induk, fasilitasi bibit/benih unggul, dan penanganan pascapanen, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai penggerak dan pengembangan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida, alsintan dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi. Penggunaan alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan hasil (*losses*). Kegiatan peningkatan produksi pertanian juga didukung dengan pengawalan yang intensif sampai tingkat lapang dan tidak terlepas dari peran luas tanam dan luas panen yang bertambah.

Rekomendasi sebagai rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja peningkatan produksi pertanian yang ditawarkan tahun yang akan datang antara lain : mengalokasikan bantuan saprodi budidaya (benih berkualitas), peningkatan perlindungan dari serangan OPT, peningkatan fasilitasi sarana pasca panen pertanian, jaminan harga dan kepastian pasar, pemberdayaan petani, pemeliharaan kebun induk, dan penanganan pascapanen, serta penguatan agroekosistem oleh para penyuluh dan diharapkan petani melakukan monitoring dan evaluasi pertanaman sejak dini guna mengantisipasi gangguan dan kerusakan akibat hama dan penyakit.

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian baik tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi ditujukan untuk peningkatan produksi pertanian dan pengalokasian yang cukup sesuai kebutuhan telah ditetapkan dengan SK Bupati Gunungkidul Nomor 132/KPTS/2024 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Urea 21.179

ton; NPK 17.251 ton; dan NPK Formula Khusus 62 ton. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi F6 Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 53,38% atau 11.306,798 ton urea dari alokasi 21.179 ton, NPK sebanyak 56,92% atau 9.819,006 ton dari alokasi 17.251 ton dan sebanyak 14,11% atau 8,75 ton dari alokasi 62 ton.

Keberhasilan dalam membina kelompok didukung oleh lingkungan strategis dalam pengembangan SDM pertanian meliputi Keberadaan lembaga-lembaga penyuluhan pertanian di daerah yang mendukung pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian seperti kelembagaan yang menangani penyuluhan, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelompok tani (Poktan); Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah seperti Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya, dan P3K; Dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

- 2) Sasaran Ketahanan Pangan Meningkatkan dengan indikator capaian skor PPH Konsumsi diukur dengan Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (%AKG x bobot masing-masing kelompok pangan). Dari target capaian skor 90 terealisasi 91,4 atau 101,56%.

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Skor PPH menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, dimana semakin beragam, semakin tinggi pula skor PPH nya. Nilai maksimal untuk skor PPH ideal adalah 100.

Secara umum pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Gunungkidul masih belum sesuai dengan PPH ideal (skor PPH 100). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama pola makan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, dan sayur buah masih berada dibawah skor ideal/skor maksimal. Artinya, konsumsi untuk kelompok pangan tersebut perlu ditingkatkan.

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan situasi ketersediaan pangan individu.

- 3) Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator Nilai AKIP PD diukur dari nilai laporan hasil Evaluasi SAKIP DPP pada t-1. Hasil Review menunjukkan kategori peringkat nilai AKIP Dinas Pertanian dan Pangan A (80,90) dengan interpretasi Dinas Pertanian dan Pangan menunjukkan predikat memuaskan yang ditandai dengan terdapat gambaran bahwa instansi/pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi

hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Sub Koordinator. Sedangkan nilai AKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan A (81,06) dengan interpretasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan predikat

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana, Dinas Pertanian dan Pangan dapat berupaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu

- a. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- b. Peningkatan Ketahanan Pangan
- c. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
- d. Pengelolaan kualitas sumber daya pertanian
- e. Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:
- f. Peningkatan produksi tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan tanaman perkebunan.
- g. Pengembangan lumbung cadangan pangan dan desa mandiri pangan
- h. Pengawasan distribusi dan harga bahan pangan.
- i. Peningkatan nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan.
- j. Tersedianya akses permodalan bagi petani
- k. Penumbuhan, pengembangan dan evaluasi klasifikasi kelompok usaha pertanian
- l. Pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian

Sedangkan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor pencapaian tahun 2025 dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan, program kerja yang ditetapkan, prioritas yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
 - b. Menentukan dan mengklarifikasi prioritas dan isu-isu kritis yang akan diselesaikan.
 - c. Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai respon dari masalah atau isu-isu kritis.
 - d. Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran.
 - e. Identifikasi akar penyebab konflik, menganalisis perekat dan pemecah serta penggunaan SWOT untuk membuat pilihan strategi identifikasi, penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindarkan ancaman
- 4) Sasaran Produksi Peternakan Meningkatkan diukur melalui angka komulatif produksi laporan statistik peternakan untuk daging sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan daging puyuh dan angka komulatif produksi laporan statistik peternakan untuk telur ayam buras, ayam buras petelur, telur itik dan telur puyuh. Capaian tahun 2024 untuk indikator kinerja Produksi daging sebesar 238,47%, dan indikator kinerja Produksi Telur sebesar

233,21%. Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator pendapatan sektor pertanian telah melebihi target RENSTRA masuk kategori sangat tinggi. Dimana capaian sampai dengan tahun 2023 terhadap 2024 untuk indikator kinerja Produksi daging 254,32% dan indikator kinerja Produksi telur sebesar 169,23%. Indikator Produksi Peternakan Meningkatkan tersebut menunjukkan ada realisasi Produksi yang turun bila dibandingkan tahun 2023. Untuk realisasi produksi tahun 2024 bila dibandingkan realisasi produksi tahun 2023 untuk komoditas Produksi daging mengalami penurunan sebesar 565,19 ton dan untuk komoditas produksi telur mengalami kenaikan sebesar 2.305,49 ton.

Produksi daging mengalami penurunan sebesar 565,19 Ton dari tahun 2023 sebesar 9.145,67 Ton menjadi 8.580,48 Ton di tahun 2024. Perhitungan produksi daging diperoleh dari penjumlahan hasil pemotongan beberapa komoditas ternak seperti sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan puyuh. Jumlah pemotongan dari semua komoditas ternak ini baik yang merupakan pemotongan ternak tercatat atau tidak tercatat memberikan kontribusi terhadap realisasi capaian produksi daging. Tahun 2024 penurunan produksi daging lebih di dominasi oleh penurunan pemotongan dari unggas pedaging. Di mata tahun 2023 untuk pemotongan ayam pedaging sebesar 5.016.343 ekor dan tahun 2024 menurun menjadi sebesar 4.541.771 ekor.

Produksi telur mengalami kenaikan dari capaian 2023 sebesar 6.085,89 Ton naik 2.305,49 Ton menjadi 8.391,38 Ton ditahun 2024. Kenaikan terjadi didominasi oleh populasi ayam buras. Populasi ayam buras mengalami kenaikan sebesar 2.192,70 Ton dibandingkan tahun 2023. Populasi unggas sangat berpengaruh terhadap produksi telur karena dengan semakin besarnya populasi maka angka betina produktif sebagai penghasil telur juga akan semakin besar. Sebagai parameter perhitungan produksi telur digunakan angka persentase betina produktif untuk ayam buras sebesar 35% dari keseluruhan populasi ayam buras, ras petelur sebesar 60%, itik sebesar 60% dan puyuh memiliki parameter betina produktif sebesar 60%.

Data pemotongan sapi potong tahun 2024 untuk pemotongan tercatat yang diperoleh adalah sebesar 6.019 ekor. Sedangkan untuk data pemotongan ternak kambing ada sekitar 25.481 ekor. Data pemotongan unggas meliputi pemotongan ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Untuk tahun 2024 ada 5 komoditas unggas yang di unggulkan.

Hasil pemotongan unggas selama tahun 2024 diperoleh data pemotongan ayam buras sebesar 722.965 ekor, ayam ras petelur sebesar 8.213 ekor, ayam ras pedaging sebesar 5.845.258 ekor, dan itik sebesar 11.262 ekor, dan puyuh sebesar 372.205 ekor. Untuk data pemotongan hewan qurban pada tahun 2024 tercatat sapi sebesar 4.263 ekor, kambing 12.524 ekor, dan domba 1.866 ekor.

5) Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan. Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan pada indikator Kinerja Jumlah Ternak yang dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan hewan sebesar 13.879 ekor atau naik sebesar 5.173 ekor dari tahun 2024.

Produksi peternakan meningkat selain ditentukan oleh jumlah pemotongan tentunya juga dipengaruhi jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Naik turunnya populasi ternak seperti sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras

pedaging, itik, puyuh, dipengaruhi beberapa faktor, seperti jumlah kelahiran ternak, kematian ternak, pemotongan ternak, serta jumlah ternak masuk dan ternak keluar.

UPT Laboratorium Kesehatan Hewan juga melaksanakan pengelolaan PAD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Tahun 2024 target pendapatan sebesar Rp 30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 35.293.500,00 atau sekitar 117,64%. Selain UPT Laboratorium Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memiliki 11 Pusat Kesehatan Hewan, yang terdiri dari 6 UPT Puskesmas yang telah definitif dan 5 Puskesmas. Peran petugas di tingkat kecamatan melalui UPT Puskesmas juga sangat besar. Mulai dari kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak, pelayanan IB, kegiatan sosialisasi hingga praktek pembuatan pakan dan pupuk. 6 UPT Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul yaitu UPT Puskesmas Nglipar, UPT Puskesmas Karangmojo, UPT Puskesmas Semanu, UPT Puskesmas Wonosari, UPT Puskesmas Playen, dan UPT Puskesmas Panggang. UPT Puskesmas ini dengan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat mempunyai target PAD yang pada tahun 2024 ini sebesar Rp 370.864.900,00.

Sebelum dilakukannya penggabungan kelembagaan pada tahun 2026, Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan masih beroperasi secara terpisah hingga akhir tahun anggaran 2025. Kinerja pelaksanaan anggaran di masing-masing dinas pada tahun tersebut mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 di Dinas Pertanian dan Pangan sebesar 89,74%% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,84%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 83,83%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (98,84%). Sedangkan penyerapan terendah pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 83,83%.

Sedangkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dianggarkan sebesar Rp 7.791.899.319,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 7.260.479.197,00 (93,18%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 531.420.122,00 (6,82%).

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Kodde Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.161.975.000				2.161.975.000				100				#DI V/0!	#DI V/0!
2 9 2 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.161.975.000				2.161.975.000				100				#DI V/0!	#DI V/0!
2 9 2 2.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	2.161.975.000				2.161.975.000				100				#DI V/0!	#DI V/0!
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	473.390.000	202.489.800	101.671.500	2.228.980.000	472.089.810		101.671.500	1.602.047.498	100	-	100	72	20,23	19,97

Kodde Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
2 9 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12.985.000	35.750.000	66.289.000	359.630.000	12.985.000	35.750.000	66.289.000	140.040.434	100	100	100	39	5,86	3,75
2 9 3 2.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4.020.000	14.760.000			4.020.000	14.760.000			100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 9 3 2.01	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	8.965.000	20.990.000	5.289.000	350.700.000	8.965.000	20.990.000	5.289.000	135.168.454	100	100	100	39	65,01	64,08
2 9 3 2.01	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan			56.950.000	4.280.000			56.950.000	2.036.000			100	48	#DIV/0!	#DIV/0!
2 9 3 2.01	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			4.050.000	4.650.000			4.050.000	2.835.980			100	61	#DIV/0!	#DIV/0!
2 9 3 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	60.000.000	1.620.000		189.340.000	59.700.000	1.620.000		1.774.967	100	100	#DIV/0!	1	#DIV/0!	#DIV/0!
2 9 3 2.02	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60.000.000	1.620.000		189.340.000	59.700.000	1.620.000		1.774.967	100	100	#DIV/0!	1	#DIV/0!	#DIV/0!
2 9 3 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	400.405.000	165.119.800	35.382.500	1.680.010.000	399.404.810	163.979.230	35.382.500	1.460.232.097	100	99	100	87	45,50	45,46
2 9 3 2.04	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per	2.200.000	2.699.800	2.350.000	4.020.000	2.200.000	2.699.750	2.350.000	-	100	100	100	-	0,66	0,21

Kodde Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan					
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi				
	Kapita per Tahun																		
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	398.205.000	162.420.000	33.032.500	1.675.990.000	397.204.810	161.279.480	33.032.500	1.460.232.097	100	99	100	87	48,74	48,71
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.420.000	4.889.000	4.740.000	1.250.000			4.740.000	499.970	-	-	100	40	-	-
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.420.000	4.889.000	4.740.000	1.250.000	2.420.000	4.889.000	4.740.000	499.970	100	100	100	40	-	0,19
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2.420.000	4.889.000	4.740.000	1.250.000	2.420.000	4.889.000	4.740.000	499.970	100	100	100	40	-	0,19
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	24.090.000	26.665.000	8.535.000	19.620.000	24.090.000		8.535.000	15.454.200	100	-	100	79	0,65	1,30
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	24.090.000	26.665.000	8.535.000	19.620.000	24.090.000	26.629.000	8.535.000	15.454.200	100	100	100	79	0,65	1,30
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	7.290.000	10.975.000	4.200.000	8.420.000	7.290.000	10.939.000	4.200.000	5.084.950	100	100	100	60	0,56	0,66
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	16.800.000	15.690.000	4.335.000	11.200.000	16.800.000	15.690.000	4.335.000	10.369.250	100	100	100	93	0,84	1,84

Kodde Rekening					Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
					Kabupaten/Kota														
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	2	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	429.808.950	521.250.000	299.545.000		429.808.950	515.217.800	299.545.000		100	99	100	#DIV/0!	-1,35	
2	2	8	2.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	429.808.950	521.250.000	299.545.000		429.808.950	515.217.800	299.545.000		100	99	100	#DIV/0!	-1,35	
2	2	8	2.08	1	Pengembangan Lumbung Mataraman	429.808.950	521.250.000	299.545.000		429.808.950	515.217.800	299.545.000		100	99	100	#DIV/0!	-1,35	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.900.686.509	10.850.273.705	12.804.761.879	11.649.938.054	15.305.601.680	1.974.825.346	12.804.761.879	7.298.105.142	96	18	100	63	-0,02	
3	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.835.250	89.117.400	178.410.000	90.955.500	32.835.250	88.113.910	178.410.000	53.731.906	100	99	100	59	1,08	
3	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.835.250	65.740.900	163.455.000	76.000.500	21.835.250	64.740.650	163.455.000	45.329.211	100	98	100	60	1,62	
3	2	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan	550.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	550.000	1.500.000	1.000.000	349.800	100	100	100	35	0,24	

Kodde Rekening					Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
			1		Dokumen RKA-SKPD														
3	2	1	2.	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	550.000	1.499.900	1.498.000	1.498.000	550.000	1.499.750	1.498.000	1.497.975	100	100	100	100	0,57	-0,63
3	2	1	2.	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	450.000	1.499.900	1.249.000	1.249.000	450.000	1.499.900	1.249.000	-	100	100	100	-	0,61	-0,70
3	2	1	2.	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	550.000	1.499.800	748.000	748.000	550.000	1.499.750	748.000	-	100	100	100	-	0,07	-0,43
3	2	1	2.	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.900.000	9.298.000	7.900.000	7.900.000	8.900.000	9.295.000	7.900.000	5.174.980	100	100	100	66	-0,14	0,08
3	2	1	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.201.757.949	8.078.900	2.560.000	2.560.000	13.720.727.968	8.078.860	2.560.000	1.379.940	97	100	100	54	-1,02	5358,43
3	2	1	2.	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.153.337.949	8.707.517.905	10.853.050.178	9.319.519.034	13.672.307.968	8.669.262.865	10.853.050.178	6.158.041.257	97	100	100	66	-0,02	0,41
3	2	1	2.	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	8.633.861.905	10.780.576.178	9.239.635.034	3.000.000	8.596.581.865	10.780.576.178	6.113.698.055	100	100	100	66	959,09	-1,06
3	2	1	2.	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45.420.000	3.498.000	3.599.000	3.599.000	45.420.000	3.498.000	3.599.000	3.598.731	100	100	100	100	-0,28	11,63
3	2	1	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.305.000	70.158.000	68.875.000	76.285.000	22.070.000	69.183.000	68.875.000	40.744.471	99	99	100	53	0,80	-0,61
3	2	1	2.	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.805.000	121.840.000	70.684.900	189.744.700	6.805.000	111.121.400	70.684.900	144.664.820	100	91	100	76	6,90	0,58
3	2	1	2.	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.500.000	14.848.000	70.684.900	67.469.700	15.265.000	14.847.900	70.684.900	42.784.820	98	100	100	63	3,70	0,43

Kodde Rekening					Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
3	2	1	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.430.600	106.992.000		122.275.000	178.621.811	96.273.500		101.880.000	100	90	#DIV/0!	83	#DIV/0!	#DIV/0!
3	2	1	2.	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.400.000	155.801.800	105.254.500	83.661.500	9.400.000	147.208.857	105.254.500	44.940.913	100	94	100	54	4,66	-1,20
3	2	1	2.	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.530.600	9.225.000	3.957.500	3.952.500	73.530.600	9.225.000	3.957.500	3.924.405	100	100	100	99	-0,86	17,41
1	2	1	2.	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.910.000	21.910.000			20.910.000	21.908.819	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!
3	2	1	2.	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.400.000	11.197.000	2.326.000	2.326.000	6.400.000	11.197.000	2.326.000	2.326.000	100	100	100	100	-0,54	1,49
3	2	1	2.	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.300.000	21.079.800	5.060.000	5.050.000	27.300.000	21.079.800	5.060.000	5.050.000	100	100	100	100	-0,84	4,15
3	2	1	2.	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.740.000	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.740.000	1.200.000	800.000	100	100	100	67	-0,32	0,40
3	2	1	2.	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.000.000	8.500.000	6.000.000	3.900.000	4.000.000	5.165.000	6.000.000	3.747.219	100	61	100	96	0,27	0,42
3	2	1	2.	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.000.000	104.060.000	65.801.000	45.323.000	56.191.211	98.802.057	65.801.000	7.184.470	99	95	100	16	-0,40	-0,19
3	2	1	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.758.270	33.176.000	180.781.200	146.585.500	60.272.000	31.466.000	180.781.200	145.804.679	98	95	100	99	4,11	0,71
3	2	0	2.	0	Pengadaan Mebel		12.375.000	15.980.000	88.802.000		11.250.000	15.980.000	88.225.908	#DIV/0!	91	100	99	#DIV/0!	3,65
3	2	1	2.	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.758.270	3.188.000	164.801.200	57.783.500	60.272.000	2.900.000	164.801.200	57.578.771	98	91	100	100	49,73	16,29

Kodde Rekening					Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi		
							17.613.000				17.316.000			#DIV/0!	98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	2	1	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.193.112.492	1.289.480.100	1.114.481.101	1.146.858.848	1.081.687.271	1.231.294.576	1.114.481.101	598.296.110	91	95	100	52	0,08	-	0,07	
3	2	1	2.	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	300.000	1.700.000	1.700.000	1.414.000	292.000	1.700.000	800.000	40	97	100	47	4,36	1,39		
3	2	1	2.	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.189.012.492	1.129.226.100	1.112.181.101	1.144.558.848	1.079.673.271	1.072.153.576	1.112.181.101	597.096.110	91	95	100	52	0,00	-	0,03	
3	2	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		158.454.000	600.000	600.000		157.349.000	600.000	400.000	#DIV/0!	99	100	67	#DIV/0!	-	1,33	
3	2	1	2.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000	1.500.000			600.000	1.500.000			100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	2	1	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.596.948	453.340.500	302.100.000	672.612.972	199.497.380	450.415.500	302.100.000	152.625.457	100	99	100	23	1,32	0,41		
3	2	1	2.	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.000.000	180.399.700	172.500.000	238.300.000	145.997.600	180.391.500	172.500.000	122.240.257	100	100	100	51	0,42	-	0,02	
3	2	1	2.	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000	25.200.000	5.100.000	5.500.000	17.499.780	25.200.000	5.100.000	3.100.000	100	100	100	56	-	0,57	1,99	
3	2	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.096.948	240.540.800	118.500.000	422.812.972	31.000.000	237.624.000	118.500.000	24.285.200	100	99	100	6	4,31	1,47		
3	2	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	5.000.000	7.200.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	7.200.000	6.000.000	3.000.000	100	100	100	50	-	0,02	-	0,22

Kodde Rekening					Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
3	2	1	2.		Penataan Organisasi	9.890.000				9.890.000				100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	2	1	2.	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.890.000				9.890.000				100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	2	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.164.117.900	2.265.081.300	1.831.636.700	1.229.702.250	1.151.458.250		1.831.636.700	636.306.063	99	-	100	52	0,20	0,46
3	2	2	2.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	979.637.000	1.935.625.800	1.540.027.100	815.060.000	967.159.900	1.861.812.875	1.540.027.100	438.996.408	99	96	100	54	0,35	0,35
3	2	2	2.	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	171.375.600	308.960.000	150.927.000	179.550.000	159.358.600	307.664.975	150.927.000	105.641.092	93	100	100	59	0,05	0,09
3	2	2	2.	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	808.261.400	1.626.665.800	1.389.100.100	635.510.000	807.801.300	1.554.147.900	1.389.100.100	333.355.316	100	96	100	52	0,35	0,32
3	2	2	2.		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	184.480.900	329.455.500	291.609.600	414.642.250	184.298.350	327.967.176	291.609.600	197.309.655	100	100	100	48	0,57	0,17
3	2	2	2.	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	184.480.900	329.455.500	291.609.600	414.642.250	184.298.350	327.967.176	291.609.600	197.309.655	100	100	100	48	0,57	0,17
3	2	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	4.422.486.190	5.022.678.560	4.589.535.400	1.607.463.600	4.210.610.940		4.589.535.400	385.964.942	95	-	100	24	0,69	0,94

Kodde Rekening					Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
					PERTANIAN														
3	2	3	2.		Pengembangan Prasarana Pertanian	169.740.000	470.329.900	273.175.400	646.239.600	168.770.000	465.003.900	273.175.400	345.554.550	99	99	100	53	1,54	0,49
3	2	3	2.	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	20.200.000	69.465.000	31.210.000	123.560.000	20.200.000	69.465.000	31.210.000	21.787.150	100	100	100	18	3,22	1,94
3	2	3	2.	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	149.540.000	400.864.900	241.965.400	522.679.600	148.570.000	395.538.900	241.965.400	323.767.400	99	99	100	62	1,32	0,31
3	2	3	2.		Pembangunan Prasarana Pertanian	4.252.746.190	4.552.348.660	4.316.360.000	961.224.000	4.041.840.940	4.542.171.000	4.316.360.000	40.410.392	95	100	100	4	-0,81	2,41
3	2	3	2.	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.792.585.450	3.723.148.660	3.616.360.000	961.224.000	2.669.206.200	3.712.971.000	3.616.360.000	40.410.392	96	100	100	4	-0,65	1,03
3	2	3	2.	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	903.145.000	829.200.000	500.000.000		823.288.000	829.200.000	500.000.000		91	100	100	#DIV/0!	-1,42	#DIV/0!
3	2	3	2.	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	33.500.740				33.500.740				100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	3	2.	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	523.515.000		200.000.000		515.846.000		200.000.000		99	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kodde Rekening					Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
3	2	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	40.595.000	174.020.800	42.297.500	128.170.000	40.515.000		42.297.500	114.749.900	100	-	100	90	2,37	1,09
3	2	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	40.595.000	174.020.800	42.297.500	128.170.000	40.515.000	173.048.300	42.297.500	114.749.900	100	99	100	90	2,37	1,09
3	2	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40.595.000	174.020.800	42.297.500	128.170.000	40.515.000	173.048.300	42.297.500	114.749.900	100	99	100	90	2,37	1,09
3	2	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.282.048.560	938.599.200	1.491.634.300	6.402.221.000	1.223.259.489		1.491.634.300	3.775.941.427	95	-	100	59	3,79	2,68
3	2	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.282.048.560	938.599.200	1.491.634.300	6.402.221.000	1.223.259.489	927.100.100	1.491.634.300	3.775.941.427	95	99	100	59	3,79	2,68
3	2	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	355.825.100	684.049.800	315.500.000	2.861.771.000	354.300.100	677.363.200	315.500.000	2.030.215.007	100	99	100	71	7,84	7,01
3	2	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	84.484.200	54.642.500	235.664.500	2.783.780.000	84.334.200	54.155.000	235.664.500	1.308.244.298	100	99	100	47	14,01	10,95
3	2	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	841.739.260	199.906.900	940.469.800	756.670.000	784.625.189	195.581.900	940.469.800	437.482.122	93	98	100	58	3,25	1,08
						25.901.618.109	20.005.947.365	21.174.357.279	23.267.344.904,00	25.021.829.119	19.774.071.489	21.174.357.279	13.829.069.142	97	99	100	59	0,08	0,19

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Kelompok sasaran layanan utama terdiri dari petani sebagai penerima manfaat utama program penyuluhan, bantuan sarana/prasarana pertanian, dan ketahanan pangan. Secara spesifik, kelompok sasaran difokuskan pada:

- Petani individu dan kelompok tani (Poktan/Gapoktan): Termasuk petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternak yang tersebar di 144 desa/kalurahan, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, akses benih, alsintan (alat dan mesin pertanian), serta pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) yang dibina oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) di setiap kecamatan.
- Masyarakat pedesaan dan kelompok lumbung pangan desa dan Kelompok Wanita Tani: Sebagai target untuk program ketahanan pangan, termasuk pengelolaan cadangan pangan lokal dan peningkatan konsumsi pangan beragam, terutama di wilayah tadah hujan yang rentan kekeringan.
- Petani milenial
- Pelaku usaha produk hasil pertanian
- Penyuluh pertanian dan aparatur terkait: Sebagai kelompok pendukung untuk pembinaan dan diseminasi teknologi pertanian, guna mencapai sasaran peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penggabungan Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menciptakan sebuah perangkat daerah dengan cakupan urusan pelayanan yang lebih luas dan kompleks, mencakup tiga sektor utama: pertanian, peternakan, dan pangan. Meskipun integrasi ini membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terdapat berbagai tantangan krusial yang harus dihadapi untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya petani, peternak, dan pelaku usaha pangan.

Pembangunan empat tahun ke depan akan dihadapkan pada tantangan perubahan lingkungan strategis yang dinamis. Persoalan mendasar banyak yang membutuhkan penyelesaian, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; tingginya alih fungsi lahan; belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan di tingkat nasional; terbatasnya akses petani terhadap permodalan; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; dan rendahnya nilai tukar petani yang diakibatkan rendahnya daya saing produk pertanian. Tantangan pelayanan urusan pertanian/peternakan yang harus dihadapi antara lain :

- Peningkatan kebutuhan pangan, sehingga sektor pertanian dituntut untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang;
- Diversifikasi konsumsi belum maksimal, menyebabkan kebutuhan bahan pangan pokok menjadi makin tinggi. Hal ini akan menjadi ancaman bagi dunia pertanian, karena petani harus selalu memproduksi bahan pangan. Ancaman ini perlu diubah menjadi

peluang bagi petani dengan menciptakan pangan alternatif yang berkualitas;

- Terbentuk pasar yang luas bagi produk-produk pertanian dan peternakan. Melalui penguasaan informasi pasar, petani dapat mengusahakan komoditas sesuai dengan preferensi konsumen. Pasar bebas yang sudah mulai terasa pengaruhnya terhadap produk pertanian.
- Pengembangan sumber energi yang terbarukan banyak memanfaatkan produk-produk pertanian, seperti jagung dan ketela pohon. Di masa datang akan terjadi kompetisi penggunaan produk pertanian yaitu sebagai bahan pangan manusia, bahan industri pakan ternak dan bahan baku industri bio energi. Beban penyediaan produk pertanian akan semakin berat seiring besarnya tuntutan kebutuhan akan produksi di tiga sektor tersebut;
- Peredaran pupuk palsu, penambahan zat pemutih pada beras, dan masih banyak lagi pemalsuan lainnya.
- Belum maksimalnya promosi produk pertanian.
- Perilaku pasar penumpukan produksi jauh melebihi daya serap pasar pada saat panen. Penetapan quota belum menjadi sesuatu yang dipandang urgen dalam menjaga posisi petani pada situasi tarik ulur antara permintaan (demand) dengan penawaran (supply);
- Petani seringkali dalam posisi tawar yang lemah dan harus berhadapan dengan industri pangan skala besar yang lebih bersifat padat modal dan padat teknologi.
- Air merupakan faktor utama dalam budidaya pertanian. Seperti halnya penggunaan lahan, dengan semakin pesatnya pembangunan berbagai sektor sumberdaya air bagi pertanian juga semakin terbatas.
- Selama ini petani sering menjual produknya dalam bentuk primer tanpa memberikan sentuhan teknologi untuk menjadi bahan setengah jadi. Akibatnya nilai tambah produk pertanian tanaman pangan dinikmati oleh pelaku yang lain, dalam hal ini bukan petani.
- Terjadinya penurunan produktivitas lahan karena penggunaan pupuk kimia, khususnya urea dalam jangka waktu yang panjang dan dalam dosis yang berlebihan.
- Akibat dari pemanasan global dimungkinkan terjadi anomali iklim yang sulit diprediksi. Hal ini harus disosialisasikan dan diupayakan meminimalkan kemungkinan kerugian yang akan timbul;
- Menurunnya SDM di sektor pertanian dikarenakan generasi muda lebih memilih bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sehingga perlu upaya terobosan di sektor agribisnis untuk menambah minat generasi muda bergerak di sektor pertanian;
- Penerapan prinsip kesejahteraan hewan belum maksimal;
- Masih adanya peredaran daging glonggongan, daging babi, bahan pengawet pada pangan hewani, cemaran kimiawi, biologis;
- Pemotongan hewan di TPH belum semuanya sesuai prosedur yang ditetapkan;
- Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapang terhadap produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal);
- Kesadaran pelaku usaha untuk mengujikan produk hewani masih kurang;

- Prasarana dan sarana yang dimiliki TPH/TPU, Los daging, Usaha Pangan Hewani (daging, telur) belum semuanya sesuai standart teknis;
- Terbatasnya bibit ternak berkualitas yang sesuai dengan standar bibit;
- Kelebagaan kelompok pembibitan belum maksimal;
- Pelaksanaan Good Breeding Practice belum terlaksana dengan baik;
- Pendataan tentang produksi dan produktivitas sumber daya genetic hewan (SDGH) belum dilaksanakan;
- Penyakit hewan menular strategis;
- Kontinyuitas ketersediaan pakan ternak;
- Persepsi masyarakat terhadap produk ternak masih rendah;
- Penyakit hewan menular strategis;
- Ketidakstabilan harga ternak dan produknya;
- Perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap performan ternak; dan
- Penggunaan pakan unggas sebagai pakan ruminansia.

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat.
- Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Kabupaten dan potensi di segala bidang yang ada.
- Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah.
- Menyediakan portal, website yang mudah diakses terhadap data informasi dan dokumen-dokumen tentang perencanaan perkembangan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Menyelenggarakan pelatihan, diklat peningkatan kapasitas aparatur
- Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat;
- Adanya Pendapatan Asli Daerah;
- Meningkatnya permintaan masyarakat akan labelisasi halal pada produk peternakan;
- Tuntutan pelaku usaha terhadap sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan hewani;
- Meningkatnya usaha pembibitan sapi local;
- Terbukanya kerjasama antara industry pengolahan hasil produk peternakan dalam pembinaan, pelatihan dan pemasaran bagi peternak/poknak/pelaku usaha produk olahan hasil ternak
- Fasilitasi penyebaran informasi pasar (komoditas pertanian) oleh media cetak dan elektronik; dan
- Dukungan anggaran.

Berbagai keterbatasan terkait potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Gunungkidul, memerlukan langkah strategis yang harus diupayakan untuk mendorong tercapainya peningkatan populasi, produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk memenuhi permintaan pasar. Disamping itu, hal terpenting dalam merevitalisasi sektor pertanian dan peternakan untuk memperkuat daya saing produk pertanian dan peternakan adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM (sumberdaya manusia)

dan meningkatkan kelembagaan sektor pertanian. Kualitas SDM sektor pertanian/peternakan yang kurang memadai menjadi persoalan yang harus ditangani secara berkelanjutan melalui pelatihan yang kontinu, penguatan jiwa kewirausahaan, pendampingan dan pengawalan.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pertanian perlu didukung dengan permodalan yang mudah dijangkau, program fasilitasi sarana dan prasarana yang tepat, pemberdayaan petani muda bermental wirausaha, pemberdayaan wanita tani, pelatihan, ketersediaan informasi pertanian yang memadai, penggunaan teknologi yang aplikatif, dan sistem jejaring pemasaran yang tepat, serta melalui penguatan sumber daya penyuluh, baik penyuluh PNS, PPPK, maupun penyuluh swadaya. Keberhasilan penyuluh dalam kegiatan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi salah satu kunci sukses dalam menggerakkan sektor pertanian menuju arah yang lebih baik menuju peningkatan daya saing.

2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi Perangkat Daerah dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Beberapa permasalahan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan tugas dan fungsi antara lain:

- a. Keterbatasan SDM petani terutama dalam penguasaan teknologi dan informasi;
- b. Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian;
- c. Keterbatasan SDM penyuluh pertanian;
- d. Keterbatasan kapasitas kelembagaan pertanian;
- e. Rendahnya nilai tambah komoditas pertanian dan peternakan;
- f. Rendahnya Infrastruktur irigasi tersier dan ketersediaan air di wilayah pertanian;
- g. Harga komoditas pertanian saat panen raya cenderung turun;
- h. Gangguan OPT dan DPI pada komoditas pertanian;
- i. Keterbatasan akses pembiayaan;
- j. Belum optimalnya produk pertanian berorientasi ekspor;
- k. Belum optimalnya pengembangan ternak;
- l. Kurangnya pengembangan komoditas pertanian lokal;
- m. Tingkat kesejahteraan petani belum optimal;
- n. Ketersediaan pangan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam daerah;
- o. Belum optimalnya penerapan keragaman konsumsi pangan; dan
- p. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil panen dan sampah makanan sisa konsumsi (*food loss dan food waste*).

2.6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada pertanian, peternakan dan pangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya produktivitas pertanian dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura belum optimal - Produktivitas ternak belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan pada pola tanam tradisional - Minimnya adopsi inovasi dan teknologi - Kualitas benih dan bibit belum terstandar - Akses alsintan dan pupuk belum maksimal - Adanya penyakit hewan menular strategis
2	Kerentanan ketahanan pangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya kerentanan pangan di beberapa wilayah - Distribusi dan cadangan pangan belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi pangan belum stabil sepanjang tahun - Infrastruktur distribusi dan logistik pangan terbatas - Sistem cadangan pangan desa belum optimal
3	Kesejahteraan petani dan peternak belum meningkat signifikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan petani/peternak fluktuatif - Nilai tukar petani rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Harga jual produk tidak stabil - Rantai distribusi terlalu panjang - Akses pasar dan pembiayaan terbatas
4	Layanan publik belum responsif dan adaptif	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan jumlah dan kapasitas penyuluh - pemanfaatan teknologi dalam pelayanan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya distribusi SDM pertanian - Sistem informasi pertanian belum terintegrasi - Minimnya pelatihan berbasis digital
5	Tata kelola dan kelembagaan tani/peternak belum kuat	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan kelompok tani dan gapoktan belum maksimal - Kolaborasi lintas sektor belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - pendampingan kelembagaan belum optimal - Belum terbentuk ekosistem agribisnis yang kuat - Partisipasi generasi muda belum maksimal

2.7. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Secara umum visi adalah gambaran keadaan yang akan dituju atau diciptakan dimasa yang akan datang. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Gunungkidul dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah ***Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban***. Untuk mewujudkan visi tersebut RPJMD Kabupaten Gunungkidul menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat; 2) Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif; 3) Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal; 4) Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban; 5) Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia. Untuk memastikan bahwa visi dan misi Pembangunan dapat di implementasikan secara nyata, maka disusun program prioritas. Program prioritas tersebut meliputi: 1) Bocah Pinter; 2) Warga Sehat, 3) Tani Makmur dan UMKM Berdaya, 4) Gunungkidul Berdikari, 5) Pamong Nglayani dan Ngayomi, 6) Warga Gayeng-Guyub, dan 7) alam lestari.

Dinas Pertanian dan Pangan untuk urusan pertanian mengacu pada misi ke-2 serta program prioritas ke-3 yaitu Tani Makmur dan UMKM Berdaya, dengan cara Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor unggulan Gunungkidul khususnya sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan skala usaha mikro dan kecil, dan industri pariwisata berbasis masyarakat. Sedangkan untuk urusan pangan, mengacu pada misi ke-5 serta program prioritas ke-7 dengan meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan resiliensi warga terhadap bencana dan perubahan iklim.

2.8. Telaahan Renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah

2.7.1. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Kabupaten Gunungkidul memiliki perodesasi yang berbeda dengan Renstra DPKP DIY yaitu 2022-2027. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY) periode 2022-2027 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027, dengan fokus pada peningkatan kualitas ketahanan pangan, produksi pertanian, dan diversifikasi pangan lokal. Dokumen ini menekankan sinergi dengan rencana nasional (Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024) dan rencana kabupaten/kota di DIY, termasuk Gunungkidul, untuk

mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di tengah tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan kerawanan pangan. Dokumen ini menunjukkan keselarasan dengan Renstra DIY melalui strategi bersama seperti pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), penyuluhan, dan diversifikasi pangan.

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2022-2027 dan analisa isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam kurun waktu 2022-2027 adalah:

Tabel 2.6
Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran Dinas Pertanian DIY
Tahun 2022-2027

No	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	Meningkatnya nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
				Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah
				Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang
			Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/ kapita/ hari
					Persentase daerah rentan rawan pangan

Terkait dengan urusan pangan, dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul periode 2025-2029 sasaran menurunnya ketidakcukupan pangan pada indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, dari sini dapat terlihat bahwa Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

merupakan hasil integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun regional sektor pertanian.

Terkait urusan pertanian, Rencana strategis DPKP DIY memiliki tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang berkaitan dengan yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul. Secara garis besar sasaran strategis yang akan dicapai adalah 1) Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan meningkat 2) produksi peternakan meningkat, pelayanan kesehatan hewan meningkat dan 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Renstra yang disusun merupakan hasil integrasi dari dokumen perencanaan peKLHSmbangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul selama rentang waktu 2025-2029 hingga di tingkat Kapanewon.

2.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Potensi pengembangan wilayah telah dirumuskan dalam Perda Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2043. Ditegaskan bahwa visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan. Dhaksinarga Bhumikarta adalah kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang subur, makmur, damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Sedangkan tujuan penataan ruang adalah “Mewujudkan wilayah kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera”.

Pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budi daya peruntukan pertanian meliputi: tanaman pangan; perkebunan dan hortikultura.

A. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan meliputi: lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi; lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi; dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar meliputi sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar dan Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih

5.510 (lima ribu lima ratus sepuluh) hektar. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan lahan pangan beririgasi meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Semin, Kapanewon Tepus dan Kapanewon Wonosari, dengan luas 8.520,60 (delapan ribu lima ratus dua puluh koma enam nol) hektar.

Adapun lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi ditetapkan seluas kurang lebih 36.065 (tiga puluh enam ribu enam puluh lima) hektar terletak pada lahan kering di semua Kapanewon. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan lahan pangan tidak beririgasi meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Semin, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus dan Kapanewon Wonosari, dengan luas 82.679,39 (delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma tiga sembilan) hektar.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas kurang lebih 5.500 (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi. Berdasar Surat keputusan Bupati Gunungkidul nomor 388/KPTS/2021 Tentang luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan tanggal 6 Desember 2021 ditetapkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2021 dengan luasan 22.234,17 (dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma tujuh belas) Ha terdiri dari :

- a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 21.576,24 (dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam koma dua puluh empat) Hektar, dan
- b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 657,92 (Enam ratus lima puluh tujuh koma Sembilan puluh dua) Hektar.

Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah memiliki sebaran lokasi spasial sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Luasan KP2B Per Kapanewon
Berdasar Surat keputusan Bupati Gunungkidul nomor
388/KPTS/2021

Kapanewon	Jenia Lahan (Ha)		LCP2B	Total
	LP2B			
	Sawah irigasi	Sawah Tadah hujan	Tegalan	
Gedangsari	236,95	460,01		696,95
Girisubo		1.273,92	11,86	1.285,78
Karangmojo	655,13	953,44		1.608,57

Kapanewon	Jenia Lahan (Ha)		LCP2B	Total
	LP2B			
	Sawah irigasi	Sawah Tadah hujan	Tegalan	
Ngawen	504,75	615,26	32,99	1.153,00
Nglipar	278,60	495,52	7,54	781,66
Paliyan	35,86	1.129,00	42,51	1.207,36
Panggung	2,36	416,31	0,83	419,50
Patuk	167,28	587,04	25,00	779,32
Playen	460,96	608,17	159,70	1.228,82
Ponjong	431,27	1.203,94	46,24	1.681,45
Purwosari	35,13	365,54		400,78
Rongkop		1.862,05		1.862,05
Saptosari		750,42	300,37	1.050,80
Semanu	100,68	2.249,30	0,60	2.350,58
Semin	712,76	700,61	17,47	1.430,84
Tanjungsari		1.215,25	5,64	1.220,90
Tepus		1.442,86		1.442,86
Wonosari	369,40	1.256,37	7,16	1.632,92
Total	3.991,12	17.535,12	657,92	22.234,17
		21.576,24	657,92	22.234,17

B. Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura meliputi:

- Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Semin dan Kapanewon Ngawen dengan komoditas utama: sawo, mangga dan rambutan;
- Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Gedangsari dengan komoditas utama: srikaya;
- Kapanewon Nglipar, Kapanewon Semin, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Playen, Kapanewon Girisubo Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Paliyan, dan Kapanewon Karangmojo dengan komoditas utama: pisang;
- Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, dan Kapanewon Nglipar dengan komoditas utama: durian; dan
- Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong dan Kapanewon Karangmojo dengan komoditas utama: sayuran.

C. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan ditetapkan seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan budidaya perkebunan meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semin, dan Kapanewon Wonosari, dengan luas 10.284,03 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh empat koma nol tiga) hektar. Kawasan yang dikembangkan sebagai tanaman perkebunan berupa lahan perkebunan tanaman tahunan seperti cengkih, kakao, lada, kapas, dan kelapa dan lahan perkebunan tanaman semusim seperti tebu, jambu mete, dan tembakau.

Arah pengembangan kawasan peruntukan pertanian difokuskan melalui pemberdayaan masyarakat setempat (kearifan lokal) dalam pengelolaan sumberdaya lahan, sumberdaya teknologi dan kelembagaan pada pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan

agribisnis pertanian secara lokalita, pembangunan prasarana yang menunjang kegiatan di kawasan peruntukan pertanian dan keterpaduan rencana tata ruang kawasan peruntukan pertanian secara berkelanjutan, dan sinergi yang dapat ditinjau ulang sekali dalam lima tahun dengan memperhatikan ekosistem dan kebutuhan pasar serta lingkungan hidup.

Rancangan iklim dan degradasi lahan menjadi isu strategis yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat terutama yang kegiatan utamanya pada sektor pertanian. Menurunnya daya dukung sumber daya alam mengakibatkan degradasi lahan yang diantaranya akibat intensifikasi pertanian yang mengharuskan adanya peningkatan produksi menyebabkan petani tergantung pada pupuk anorganik.

Degradasi fungsi lahan daerah resapan akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air dalam tanah. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian juga mempengaruhi kualitas air.

D. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan meliputi: pengembangan pembibitan ternak sapi potong; pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing; pengembangan kambing bligon; dan pengembangan ternak unggas. Kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong meliputi:

- a. Kapanewon Ponjong;
- b. Kapanewon Semanu;
- c. Kapanewon Semin;
- d. Kapanewon Nglipar;
- e. Kapanewon Ngawen;
- f. Kapanewon Patuk;
- g. Kapanewon Playen,
- h. Kapanewon Wonosari;
- i. Kapanewon Karangmojo dan
- j. Kapanewon Gedangsari.

Adapun kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing meliputi seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.

Kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan kambing bligon meliputi:

- a. Kapanewon Girisubo;
- b. Kapanewon Rongkop;
- c. Kapanewon Tepus;
- d. Kapanewon Tanjungsari;
- e. Kapanewon Saptosari;
- f. Kapanewon Paliyan;
- g. Kapanewon Panggang; dan
- h. Kapanewon Purwosari.

Sedangkan Kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan ternak unggas meliputi:

- a. Kapanewon Ponjong;
- b. Kapanewon Karangmojo;
- c. Kapanewon Semanu;
- d. Kapanewon Wonosari;
- e. Kapanewon Patuk;

- f. Kapanewon Semin; dan
- g. Kapanewon Playen.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah. Pengaturan tentang lingkungan hidup telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya juga diatur secara lebih detail dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan secara terinci dijabarkan dalam indikator-indikator capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDG's).

Kajian pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metode ilmiah diperlukan untuk mengetahui kondisi capaian TPB pada suatu daerah yang menjadi dasar penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan untuk menyusun target dan kebijakan pembangunan selanjutnya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa proses analisis kajian lingkungan hidup harus memastikan bahwa pembangunan daerah telah memperhatikan kondisi lingkungan hidup untuk mewujudkan keselarasan antara pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan penggunaannya. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang perlunya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan hidup dapat diwujudkan.

Bahwa dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan kemudian pelingkupan untuk memperoleh daftar pendek isu-isu lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD dan merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi, yang rumusan rekomendasi diintegrasikan dalam RPJMD.

KLHS RPJMD juga memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar pemikiran dengan melakukan pengkajian capaian pelaksanaan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis yang menjadi Permasalahan Daerah di Kabupaten Gunungkidul pada pilar sosial yaitu rendahnya kualitas ketahanan pangan dan gizi, dan pada pilar ekonomi meliputi belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha.

2.10. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi ada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis yang dirumuskan tidak hanya didasarkan pada tinjauan kesenjangan pelayanan hasil identifikasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, tetapi juga berdasarkan berbagai faktor dari pelayanan yang mempengaruhi ditinjau berdasarkan:

1. Tugas dan fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, dan Kabupaten
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Hasil telaah terhadap visi dan misi kepala daerah dan dari faktor pelayanan baik secara internal dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2025-2029 yaitu:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta belum terlaksananya Standar Pelayanan dengan baik. Di sisi lain pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.

Reformasi birokrasi ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.

2. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan kalori sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan protein sebesar 63 gram/kap/hari.

3. Keterjangkauan Pangan

Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat. Untuk itu dikembangkan program pemerataan pasokan pangan dengan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gappoktan) sebagai pelakunya melalui penumbuhan kegiatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Selain itu juga ditumbuhkan kembali gerakan menyimpan hasil panen melalui kelompok lumbung pangan.

4. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Gunungkidul adalah protein hewani serta sayur dan buah. Untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak di pekarangannya sebagai sumber pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan keluarga.

Sosialisasi dari stakeholders terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Apalagi Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, dalam rangka menjamin pangan yang beredar di Kabupaten Gunungkidul memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis pangan.

5. Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah kondisi masyarakat, daerah atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat bersifat kronis (*chronical*) dan mendadak/ sementara (*transien*). Kerawanan pangan kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan kemiskinan. Sedangkan, kerawanan *transien* adalah kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya. Pada tahun 2020 masih terdapat satu desa rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu di desa Tegalrejo (Gedangsari). Namun pemetaan pada wilayah Kalurahan, masih terdapat sejumlah

Kalurahan rawan pangan dengan jumlah yang semakin menurun setiap tahunnya.

6. Ketergantungan Konsumsi Pangan Masyarakat terhadap Pangan Beras

permasalahan ketahanan pangan lainnya adalah ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras sekitar 86 kg/kapita/tahun. Diversifikasi pangan perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, gembili, suweg, ganyong dan garut, karena capaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

7. Alih Fungsi Lahan

Secara umum, produksi komoditas pertanian khususnya dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sangat bergantung pada kondisi iklim/cuaca karena mayoritas lahan pertanian merupakan lahan kering yang tidak beririgasi. Selain itu, laju alih fungsi lahan pertanian juga cukup berperan terhadap capaian produksi pertanian. Berdasarkan data BPS selama periode 2009-2019 (10 tahun), terdapat pengurangan jumlah lahan sawah sebanyak 2 hektar dan lahan tegalan/ kebun sebanyak 2.663 hektar. Untuk menjaga agar lahan pertanian tidak beralih fungsi, maka ditetapkanlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 5.500 hektar pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Namun berdasarkan analisis peta lahan pertanian, LP2B di Kabupaten Gunungkidul akan direncanakan untuk ditetapkan seluas 29.020,86 hektar pada review RTRW Kabupaten Gunungkidul. Bahkan luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) akan direncanakan untuk ditetapkan seluas 51.312 hektar yang terdiri atas LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 22.291,14 hektar. KP2B yang akan ditetapkan tersebut luasnya sekitar 34% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dan mayoritas merupakan lahan kering. Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjaga agar KP2B tersebut tidak beralih fungsi dan dapat berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

8. Pendidikan dan Usia Petani

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Provinsi DI Yogyakarta oleh BPS tahun 2018, jumlah rumah tangga usaha pertanian dan kelompok umur kepala rumah tangga merupakan tenaga kerja yang berusia \geq 65 tahun sebanyak 49.320, kelompok usia 45-54 tahun sebanyak 42.476, kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 42.456, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 25.816, kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 8.815 dan disusul tenaga kerja kelompok usia $<$ 25 tahun sebanyak

398. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.

9. Pemanfaatan Teknologi

Salah satu kunci dari Rancangan sektor pertanian di era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani. BPS (2018) menyatakan bahwa potensi internet di tingkat petani dan perdesaan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 93,9%. Sebagian besar pengguna internet melakukan akses internet melalui telepon seluler.

Jumlah Petani yang menggunakan Internet selama setahun yang lalu menurut data Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Provinsi DI Yogyakarta oleh BPS tahun 2018 sebanyak 35.292 orang. Sedangkan jumlah petani yang tidak menggunakan internet selama setahun yang lalu sebanyak 196.425 orang.

Dari data terlihat bahwa masih lambatnya aplikasi teknologi tepat guna dimanfaatkan oleh petani di sektor pertanian. Baru sekitar 15,23% yang memanfaatkannya. Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal 2G, 3G dan 4G. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian.

10. Kelembagaan dan Sumber Daya manusia

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 memiliki PNS dan P3K 100 prang dan penyuluh swadaya sebanyak 144 orang. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran BPP (Balai penyuluh Pertanian) berkembang tidak hanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi diupayakan sebagai tempat untuk mengenalkan model-model usahatani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitas informasi, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi musyawarah, dll) dan pelaksanaan program penyuluhan. Oleh sebab itu, guna menghasilkan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat mencapai target pembangunan pertanian, penyelenggara penyuluhan di lapangan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana terstandarisasi dan tepat guna.

11. Harga produk pertanian yang fluktuatif akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
12. Kurangnya peran generasi muda dan kelembagaan pertanian terutama Gapoktan, Kelompok Tani, UPJA, penangkar dan produsen benih, kelompok pengolahan hasil, serta P3A/GP3A/IP3A;
13. Kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan pola tanam yang tepat; dan
14. Perlindungan bagi petani saat terjadi gagal panen (Asuransi Usaha Tani), kematian ternak sapi (AUTS);

Tabel 2.8
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Pd
			Global	Nasional	Regional	
Pertanian dan Pangan	Lahan	Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha	perubahan iklim, perubahan geopolitik, penurunan kualitas tanah akibat over farming dan penggunaan bahan kimia	penurunan luas lahan sawah secara nasional setiap tahun karena alih fungsi lahan ke non-pertanian	Perkembangan pesat pariwisata, pemukiman dan industri. menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian, terutama sawah dan ladang, penurunan kualitas tanah dan penggunaan bahan kimia produktif yang dekat akses jalan dan pantai.	Peningkatan ketahanan pangan
	Dampak Perubahan iklim	Rendahnya kualitas ketahanan pangan dan gizi	Perubahan iklim meningkatkan suhu global, mengubah pola curah hujan, dan mempercepat kejadian cuaca ekstrem (banjir, kekeringan, badai).	Fenomena El-Niño/La-Niña berdampak pada kegagalan panen dan kekeringan lahan pertanian.	Kekeringan tahunan (Juni-Agustus) berdampak pada terbatasnya masa tanam komoditas pangan tertentu	Peningkatan ketahanan pangan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Pd
			Global	Nasional	Regional	
	Sarana Prasarana Pertanian		Peralihan ke <i>smart farming</i> membutuhkan alat dan infrastruktur adaptif	Mekanisasi belum merata, subsidi input pertanian kurang tepat sasaran, kurangnya asintan adaptif iklim dan topografi serta minimnya gudang dan cold storage berdampak pada produktivitas rendah, loose hasil panen masih tinggi	Sebagian besar lahan tadah hujan, sehingga sebaran sarana prasarana belum merata berdampak pada tidak terbantu mekanisasi sehingga terjadi kehilangan hasil panen, harga jual rendah dan produktivitas fluktuatif	Penerapan teknologi pertanian berkelanjutan
	Sumber Daya Manusia Pertanian		<i>Aging farmers</i> , kurang minatnya generasi muda di sektor pertanian, urbanisasi tenaga kerja ke kota berdampak pada tenaga kerja pertanian berkurang, Gap teknologi, keberlanjutan produksi pertanian.	Sebagian besar petani berusia tua, pendidikan rendah, penyuluh minim dan tidak merata, akses pelatihan vokasi kurang berdampak pada kapasitas adaptasi dan inovasi terhadap teknologi baru kurang	Dominasi petani tua di Gunungkidul, Minat pemuda rendah terhadap pertanian, Keterbatasan jumlah dan kapasitas penyuluh, dan Belum semua kelompok tani aktif dan berdaya berdampak pada rendahnya produktivitas karena adopsi inovasi, transfer teknologi, regenerasi dan pendampingan spesifik kurang	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pertanian
			lahan produktif telah mengalami degradasi. Laju ini makin meningkat akibat praktik	Lahan kering lebih banyak mengalami degradasi.	Penggunaan pupuk kimia tidak sesuai ketentuan untuk produksi yang tinggi	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Pd
			Global	Nasional	Regional	
			pertanian yang tidak berkelanjutan.			
Peternakan dan Kesehatan Hewan	Menurunnya populasi dan produksi ternak	Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha	Perubahan Iklim	Ekonomi biru	Cadangan pangan perlu terus ditingkatkan	Peningkatan populasi dan produksi ternak
	Kurangnya ketersediaan sarana prasarana peternakan					Peningkatan ketersediaan sarana prasarana peternakan
	Kurangnya jumlah SDM di bidang peternakan					Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM di bidang peternakan
	Adanya kasus penyakit hewan					Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang merupakan kegiatan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan dan sejalan visi Kepala Daerah terpilih yaitu Terwujudnya Masyarakat Adil makmur, Lestari dan berkeadaban, dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Adapun tujuan dari sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Tujuan PD : Meningkatnya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan
Indikator tujuan : Nilai PDRB ADHK pertanian sub kategori tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (Rp)
2. Sasaran PD
 - a) Menurunnya ketidakcukupan pangan
Indikator Sasaran:
 - Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment/PoU)
 - b) Meningkatnya produksi pertanian
Indikator Sasaran:
 - Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton)
 - Jumlah produksi daging (ton)
 - Jumlah produksi telur (ton)
 - c) Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan
Indikator Sasaran
 - Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular (persen)

Tujuan dan sasaran sebagaimana yang akan dicapai dengan penentuan-penentuan sasaran dan kebijakan dan telah dijabarkan dan disusun dalam program-program yang implementatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Dari uraian di atas, tujuan, indikator dan target kinerja tujuan serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan disampaikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pertanian dan Pangan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai PDRB ADHK pertanian sub kategori tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Rupiah	2.635.306.433. 739	2.682.555.247. 135	2.730.651.191. 755	2.779.609.455. 947	2.829.445.500. .369	2.880.175.062. 878
2	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment)	persen	8.05-8.40	7.61-7.96	7.17-7.52	6.73-7.08	6.29-6.64	5.85-6.20
3	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton)	ton	1.347.371,9 3	1.368.363,0 5	1.371.090,4 2	1.374.506,1 1	1.377.938,3 9	1.382.152,01
4	Jumlah produksi daging	ton	8.597,65	8.632,04	8.683,83	8.774,62	8.810,21	8.880,69
5	Jumlah produksi telur	ton	8.416,56	8.458,64	8.517,85	8.590,25	8.671,86	8.757,58
6	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular	persen	100	100	100	100	100	100

3.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan menggambarkan upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar perumusan kegiatan dan program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

3.2.1. Perumusan Strategi

Kondisi perangkat daerah dengan faktor internal dan eksternal memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki menterjemahkan isu strategis menjadi potensi modal pembangunan dengan tetap mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya.

Faktor Internal

a. Kekuatan

- Tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan telah memberikan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat pertanian melalui perbaikan pendapatan, peningkatan produktivitas dan pemberdayaan

- Aparatur di Dinas Pertanian dan Pangan tidak membedakan kualitas penanganan terhadap berbagai permasalahan pada sektor pertanian baik urusan pertanian ataupun pangan;
- Terjalannya koordinasi rutin Dinas Pertanian dan Pangan dengan OPD lain terkait kedinasan
- SDM Dinas Pertanian dan Pangan berpengalaman dan berkompeten
- Tersedia jaringan informasi terkait data
- Banyak peluang promosi produk komoditas pertanian

b. Kelemahan

- Keterbatasan kapasitas SDM pertanian, hal ini ditunjukkan dengan hasil sensus pertanian menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rumah tangga pertanian tahun 2023 (143.943 RTUP) sebesar 13,46% dibandingkan dengan data sensus pertanian pada tahun 2013 (166.330 RTUP). Sebesar 30,39% penduduk Kab Gunungkidul merupakan rumah tangga petani dengan kelompok umur di atas 65 tahun dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan kemampuan tenaga kerja di sektor pertanian relatif rendah dibandingkan sektor lainnya
- Keterbatasan lahan. Hal ini ditunjukkan jumlah petani Gurem (penguasaan lahan dibawah 0,5Ha) hasil sensus pertanian 2023 sebesar 83,49% . Sedangkan laju alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif, terbukti Hasil update LBS tahun 2023 (26.828 Ha) di Kab. Gunungkidul mengalami penurunan rata-rata sebesar 16% dari SK LBS 2019 (31.973 Ha)
- Ketergantungan pada kondisi iklim dan cuaca
- Fluktuasi produksi pertanian, terjadi over product pada saat panen raya dan kelangkaan produk pada saat paceklik
- Kegiatan usaha kelompok tani masih terbatas secara skala ekonomi sehingga belum memiliki posisi tawar yang kuat, utamanya dalam hal pemasaran produk.

Faktor Eksternal

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan pertanian. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Dinas Pertanian dan Pangan baik dalam lingkup daerah dan propinsi.

a. Peluang

- Petani DIY sangat apresiatif terhadap pelayanan Dinas, sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan;
- Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitas dari Dinas;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses langsung data dan informasi Dinas;
- Terjalannya kerjasama dengan Dinas Komunikasi, dan Informatika dalam hal pengembangan sistem informasi (siaran radio, WEB);

- Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk dengan akademisi dan aparatur penelitian dan pengembangan (LIPI, BPTP, Perguruan Tinggi);
- Tersedianya program beasiswa untuk SDM Dinas;
- Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan berbagai ekspo;
- Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan DAK dan Tugas Pembantuan APBN;

b. Ancaman

- Masyarakat petani gunungkidul sebagian termasuk ke dalam kategori penduduk miskin dan rentan miskin;
- Masih adanya pengajuan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian untuk kebutuhan akan ruang pemukiman dan sarana pendukungnya;
- Kondisi saat ini, Kabupaten Gunungkidul memiliki 37 sungai yang sebagian besar kering pada musim kemarau dan memiliki 286 danau yang sebagian besar juga mengering di musim kemarau;
- penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan;
- Masih adanya serangan OPT dan DPI; dan
- Pemalsuan produk pertanian/oplos (pupuk, beras).

Berdasarkan strategi-strategi di atas ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi kunci keberhasilan dengan mempertimbangkan keterkaitan strategi dengan visi dan misi. Berdasarkan penilaian terhadap keterkaitan tersebut diperoleh faktor kunci/penentu keberhasilan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dalam membangun pertanian dan ketahanan pangan yang merupakan kerangka strategi yaitu :

- Fasilitasi dan optimasi Sarana prasarana Tanaman pangan dan hortikultura (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumberdaya air, dan permodalan);
- Pengembangan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis bagi generasi muda;
- Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui standardisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan;
- Mengembangkan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana);
- Mengembangkan kawasan sentra produksi yang berdampak terhadap pendapatan petani;
- Mengembangkan sentra-sentra pembibitan ternak lokal;
- Melakukan pendampingan dan pengawalan kelompok;
- Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh, memantapkan kelembagaan penyuluhan, dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan;
- Menumbuhkan dan memberdayakan petani milenial;
- Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan penyakit hewan menular strategis (PHMS);
- Menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian; dan

- Meningkatkan ketersediaan, akses, konsumsi, dan keamanan pangan.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya diidentifikasi analisis faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, seperti tertera pada Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.2
Penentuan Alternatif Strategi

FAKTOR	Strenght (Kekuatan)	Weakness(Kelemahan)
Internal Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kelembagaan dan Tupoksi Dinas yang mendukung ▪ Fungsi koordinasi yang baik ▪ Tersedianya sumberdaya aparatur ▪ Tersedianya akses informasi propinsi dan pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • anggaran dan pembiayaan belum merata • Sarana dan prasarana operasional belum memadai • Kinerja aparatur belum optimal • Tingkat keterampilan aparatur masih rendah
Opportunity (Peluang)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk pertanian • Tersedianya sumber daya pertanian lokal potensial • Potensi diversifikasi pengembangan produk olahan pertanian masih tinggi • Kebutuhan petani terhadap teknologi • Budaya lumbung pangan di masyarakat • Masih luasnya potensi pertanian yang belum digarap • Tingginya permintaan pasar terhadap produk pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan produk pertanian melalui regulasi Pemerintah Provinsi • Pengembangan kawasan pertanian : tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan lahan eks tambang • Memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya aparatur untuk mendukung pelaku usaha dan konsumen • Memanfaatkan akses informasi untuk memperkenalkan teknologi pertanian kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian untuk pemenuhan konsumsi masyarakat • Peningkatan penguasaan teknologi pertanian dalam rangka pengolahan hasil pertanian dan limbah hasil pertanian • optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan • Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam menciptakan produk kompetitif • Optimalisasi kinerja aparatur dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin bertambah • Meningkatkan keterampilan aparatur untuk meningkatkan kualitas petani dalam menggunakan teknologi pertanian
Treath (Ancaman)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya hama tanaman, dan Kelangkaan pupuk • Belum maksimal pengawasan terhadap kualitas produk pertanian • Kurangnya sarana dan prasarana untuk penyusunan materi dan penyampaian metode penyuluhan • Kondisi iklim yang tidak menentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi antar sektor agar mampu menghadapi globalisasi atau perdagangan bebas di masa yang akan datang • Optimalkan penyuluhan yang efektif dan efisien • Memanfaatkan kelembagaan petani yang ada sebagai wadah proses belajar dan wadah transfer teknologi • Meningkatkan sumberdaya aparatur melalui pelatihan-pelatihan profesi • Memperluas akses informasi kepada masyarakat mengenai peluang kerja dalam pertanian dan peternakan sehingga meningkatkan minat generasi muda untuk bertani 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan untuk pengembangan pertanian khususnya Padi, Jagung, Kedele, bawang merah, cabe besar, sapi potong, kakao, mete • Meningkatkan pengawasaan terhadap hama / penyakit tanaman, distribusidan pupuk. • Meningkatkan kualitas SDM petani melalui penyuluhan untuk ketahanan pangan • Meningkatkan kemajuan petani dan mengoptimalkan lahan yang sempit • Menyusun perencanaan pertanian yang baik agar tidak terjadi benturan antar sub sektor

3.2.2. Strategi Perangkat Daerah

Penetapan sasaran kinerja perangkat daerah memberikan gambaran tentang kondisi yang ingin diwujudkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul pada periode 2025-2029. Indikator kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan menjabarkan kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan secara terinci guna mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pencapaian visi pembangunan dituangkan pada pentahapan pembangunan dengan mengusung tema penguatan fondasi pada periode lima tahun pertama. Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan pembangunan disajikan pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	Percepatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	Peningkatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	Optimalisasi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	Pemantapan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan

3.2.3. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan. Dengan memperhatikan operasional NSPK dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra

	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
1	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian secara optimal dan berkelanjutan	Meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian, serta perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Urusan Pertanian
		Meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam sektor pertanian	Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian yang inovatif dan kreatif	
		Meningkatkan	Menguatkan kelembagaan	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
	kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor pertanian	petani dan pemberdayaan petani dalam melakukan agribisnis produk pertanian	
		Menumbuhkembangkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian	
	Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian	Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang tepat guna	
		Mengoptimalkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	
	Meningkatkan harga jual hasil pertanian dan akses pasar yang lebih luas	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian	
	Menurunkan biaya produksi melalui penggunaan teknologi yang efisien	Mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi melalui penerapan <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i>	
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana peternakan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana peternakan yang berkualitas	
		Mendorong peningkatan perizinan usaha peternakan	
	Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM di bidang peternakan	Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM di bidang peternakan	
	Meningkatkan ketahanan sektor peternakan terhadap penyakit hewan dan perubahan iklim	Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana peternakan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana peternakan yang berkualitas	
		Mendorong peningkatan perizinan usaha peternakan	
	Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM di bidang peternakan	Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM di bidang peternakan	
	Meningkatkan ketahanan sektor peternakan terhadap penyakit hewan dan perubahan iklim	Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
2 Terciptanya Kondidi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatkan keberagaman konsumsi pangan dan penerapan pola makan beragam,	Meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di masyarakat	Urusan Pangan

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
	bergizi, seimbang dan aman (B2SA)		
	Mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat untuk ketahanan pangan	Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	
	Meningkatkan akses pangan yang memadai bagi masyarakat miskin dan rentan	Meningkatkan pemantauan stok dan harga pangan	
		Mengkoordinasikan penanganan kalurahan rentan pangan	
	Meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan segar untuk memenuhi standar yang berlaku	Meningkatkan penanganan dan pengawasan keamanan pangan	
	Meningkatkan berbagai intervensi kegiatan dalam rangka penurunan kalurahan waspada pangan	Mengkoordinasikan pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan lintas sektor	

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan selama lima tahun mendatang, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi II	Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif		
Misi V	Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	Menurunnya ketidakcukupan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan	Meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di masyarakat
			Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
			Meningkatkan pemantauan stok dan harga pangan
			Mengkoordinasikan penanganan kalurahan rentan pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan penanganan dan pengawasan keamanan pangan
			Mengkoordinasikan pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan lintas sektor
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Meningkatkan produksi pertanian	Meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian, serta perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
			Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian yang inovatif dan kreatif
			Menguatkan kelembagaan petani dan pemberdayaan petani dalam melakukan agribisnis produk pertanian
			Menumbuhkembangkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian
			Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang tepat guna
			Mengoptimalkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
			Mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP)
		Meningkatkan produksi peternakan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana peternakan yang berkualitas
			Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM di bidang peternakan
			Mendorong peningkatan perizinan usaha peternakan
		Meningkatkan daya saing produk pertanian	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan	Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam kerangka Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul periode 2025-2029, program kegiatan dan sub kegiatan dirancang sebagai penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang bertujuan mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, peningkatan produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani. Program-program ini difokuskan pada pemberdayaan kelembagaan petani, penyediaan sarana prasarana, dan diversifikasi pangan lokal, dengan penekanan pada sinergi antar bidang seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Program utama dirancang untuk mendukung visi Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban, dengan alokasi anggaran yang selaras dengan prioritas. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasional rencana pendanaan harus dituangkan kedalam program/ kegiatan/ sub kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program yang disusun di dalamnya harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan. Bagan alur dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai pembangunan daerah dimulai dari tahun 2026 sampai tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan upaya dari menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-3034.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
 - 1 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 2 Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 3 Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
 - 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- B Urusan Pemerintahan Pilihan
 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
 - 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 5 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 6 Program Perizinan Usaha Pertanian
 - 7 Program Penyuluhan Pertanian

Dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2025-2029, selain menyampaikan tabel tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 juga disampaikan teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang tersaji pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Lestari	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Menurunnya ketidacukupan pangan			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Of Under nourishment)				
			Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Dokumen Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan					Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kabupaten/ Kota
									Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ Kota
									Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Yang Terlaksana				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
									Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Dokumen Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota					Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Pengawasan Dan Mutu Keamanan Pangan	Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota
									Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
									Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya Dan Kesejahteraan Warga	Dokumen Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya Yang Terlaksana		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman
									Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Pembangunan Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya produksi pertanian	Meningkatnya Produksi Perkebunan Dan Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Ton)	Produksi Perkebunan Dan Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura					Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Produksi Tanaman Pangan			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen TP					Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen TP
			Tersedianya Benih Padi Bersertifikat Secara Berkelanjutan Di Balai Benih Pertanian	Tersedianya Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Hasil Perbanyak		Produksi Benih Padi Bersertifikat Balai Benih Pertanian			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Kunjungan Layanan Edukasi Teknologi Pertanian Di Ttp Nglanggeran	Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan		Jumlah Pengunjung Ttp Nglanggeran			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
			Meningkatnya Prasarana Perkebunan Dan Hortikultura Yang Dapat Digunakan Dengan Baik	Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Persentase Prasarana Perkebunan Dan Hortikultura Yang Dapat Digunakan Dengan Baik	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Laporan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Prasarana Tanaman Pangan Yang Dapat Digunakan Dengan Baik	Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /Lp2b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /Kp2b Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /Lcp2b		Persentase Prasarana Tanaman Pangan Yang Dapat Digunakan Dengan Baik			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lp2b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kp2b Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lcp2b
				Laporan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Tanaman Pangan	Luasan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan		Persentase Bencana Tanaman Pangan Yang Tertangani	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
			Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan Dan Hortikultura	Luasan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Dpi) Hortikultura Dan Perkebunan		Persentase Bencana Perkebunan Dan Hortikultura Yang Tertangani			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Dpi) Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
			Meningkatnya Kapasitas Sdm Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa		Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa
				Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
			Meningkatnya Populasi Ternak	Laporan Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Daging (Ton)	Jumlah Populasi Ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Laporan Pengawasan Produksi Dan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hpt, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Telur (Ton)			Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Hpt, Bahan Pakan/Pakan
									Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak
				Laporan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak					Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Prasarana Peternakan Yang Dapat Digunakan Dengan Baik	Pembangunan Prasarana Peternakan		Persentase Prasarana Peternakan Yang Dapat Digunakan Dengan Baik	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
			Meningkatnya Usaha Peternakan Yang Telah Memiliki Izin Usaha	Laporan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Usaha Peternakan Yang Sudah Memiliki Nib	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Dan Izin Usaha Pertanian

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Phms)	Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular (Persen)	Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha
			Meningkatnya Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Hewan Yang Terlaksana		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
			Meningkatnya Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	Laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Persentase Layanan Di Pusat Kesehatan Hewan Yang Terlaksana			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD
									Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
									Koordinasi Dan Penyusunan DPA -SKPD
									Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
									Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
									Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
									Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Dokumen Administrasi Kepegawaian				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
									Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
				Dokumen Administrasi Umum				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
									Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
									Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
									Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
									Fasilitasi Kunjungan Tamu
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
									Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
									Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
									Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran PD	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
									Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
									Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
									Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2.544.247.742,00		1.497.820.725,00		1.715.199.260,00		2.218.687.200,00		2.164.427.600,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				2.302.225.000,00		1.185.829.025,00		1.367.281.280,00		1.828.452.100,00		1.770.290.100,00	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	91.8	92.5	2.302.225.000,00	93	1.185.829.025,00	93.5	1.367.281.280,00	94	1.828.452.100,00	94.5	1.770.290.100,00	
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				740.562.500,00		792.676.625,00		895.498.400,00		1.123.147.600,00		1.057.932.400,00	
Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	360	740.562.500,00	360	792.676.625,00	360	895.498.400,00	380	1.123.147.600,00	380	1.057.932.400,00	
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	12	12		12		12		12		12		
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	6	2		2		2		2		2		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				312.132.500,00		336.589.125,00		344.126.000,00		451.332.300,00		379.399.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	360	312.132.500,00	360	336.589.125,00	360	344.126.000,00	380	451.332.300,00	380	379.399.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				4.280.000,00		13.558.000,00		20.337.000,00		34.572.900,00		34.918.600,00	
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	12	12	4.280.000,00	12	13.558.000,00	12	20.337.000,00	12	34.572.900,00	12	34.918.600,00	
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				419.500.000,00		436.740.000,00		524.088.000,00		628.905.600,00		635.194.600,00	
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	6	2	419.500.000,00	2	436.740.000,00	2	524.088.000,00	2	628.905.600,00	2	635.194.600,00	
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				4.650.000,00		5.789.500,00		6.947.400,00		8.336.800,00		8.420.200,00	
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1	4.650.000,00	1	5.789.500,00	1	6.947.400,00	1	8.336.800,00	1	8.420.200,00	
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				1.561.662.500,00		393.152.400,00		471.782.880,00		705.304.500,00		712.357.700,00	
Dokumen pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang terlaksana	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	10	4	1.561.662.500,00	4	393.152.400,00	4	471.782.880,00	4	705.304.500,00	4	712.357.700,00	
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	1		1		1		1		1		
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				5.420.000,00		6.582.600,00		7.899.120,00		9.478.900,00		9.573.800,00	
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	1	5.420.000,00	1	6.582.600,00	1	7.899.120,00	1	9.478.900,00	1	9.573.800,00	
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.556.242.500,00		386.569.800,00		463.883.760,00		695.825.600,00		702.783.900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	10	4	1.556.242.500,00	4	386.569.800,00	4	463.883.760,00	4	695.825.600,00	4	702.783.900,00	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				172.062.900,00		194.234.500,00		206.609.340,00		220.664.900,00		222.871.500,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	18.75	15.97	172.062.900,00	14.58	194.234.500,00	13.19	206.609.340,00	11.81	220.664.900,00	10.42	222.871.500,00	
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				172.062.900,00		194.234.500,00		206.609.340,00		220.664.900,00		222.871.500,00	
Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	10	172.062.900,00	10	194.234.500,00	10	206.609.340,00	10	220.664.900,00	10	222.871.500,00	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	2		2		2		2		2		
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				151.182.900,00		155.718.300,00		160.389.900,00		165.201.600,00		166.853.600,00	
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	10	151.182.900,00	10	155.718.300,00	10	160.389.900,00	10	165.201.600,00	10	166.853.600,00	
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				20.880.000,00		38.516.200,00		46.219.440,00		55.463.300,00		56.017.900,00	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	2	20.880.000,00	2	38.516.200,00	2	46.219.440,00	2	55.463.300,00	2	56.017.900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				69.959.842,00		117.757.200,00		141.308.640,00		169.570.200,00		171.266.000,00	
Meningkatnya pengawasan dan mutu keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	74	77	69.959.842,00	79	117.757.200,00	81	141.308.640,00	83	169.570.200,00	85	171.266.000,00	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				69.959.842,00		117.757.200,00		141.308.640,00		169.570.200,00		171.266.000,00	
Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0	4	69.959.842,00	4	117.757.200,00	4	141.308.640,00	4	169.570.200,00	4	171.266.000,00	
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	2		2		2		2		2		
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				29.578.500,00		42.566.200,00		51.079.440,00		61.295.300,00		61.908.300,00	
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4	4	29.578.500,00	4	42.566.200,00	4	51.079.440,00	4	61.295.300,00	4	61.908.300,00	
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				16.630.400,00		34.344.200,00		41.213.040,00		49.455.600,00		49.950.200,00	
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0	4	16.630.400,00	4	34.344.200,00	4	41.213.040,00	4	49.455.600,00	4	49.950.200,00	
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				23.750.942,00		40.846.800,00		49.016.160,00		58.819.300,00		59.407.500,00	
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	2	23.750.942,00	2	40.846.800,00	2	49.016.160,00	2	58.819.300,00	2	59.407.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				701.621.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				701.621.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00	
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap pengembangan	92.31	93.55	701.621.000,00	96.77	2.650.000.000,00	96.97	2.650.000.000,00	97.14	2.650.000.000,00	97.22	2.650.000.000,00	
2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				701.621.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00	
Persentase Peningkatan Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	1	4	701.621.000,00	4	2.650.000.000,00	4	2.650.000.000,00	4	2.650.000.000,00	4	2.650.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	0	4		4		4		4		4		
2.22.08.5.06.0001 - Pengembangan Lumbung Mataraman				550.000.000,00		1.517.231.000,00		1.517.231.000,00		1.517.231.000,00		1.517.231.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	1	4	550.000.000,00	4	1.517.231.000,00	4	1.517.231.000,00	4	1.517.231.000,00	4	1.517.231.000,00	
2.22.08.5.06.0007 - Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional				151.621.000,00		1.132.769.000,00		1.132.769.000,00		1.132.769.000,00		1.132.769.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	0	4	151.621.000,00	4	1.132.769.000,00	4	1.132.769.000,00	4	1.132.769.000,00	4	1.132.769.000,00	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.577.508.049,00		29.861.939.226,00		29.993.464.061,00		30.395.643.962,00		30.586.957.400,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.737.755.549,00		22.906.676.520,00		21.996.223.092,00		22.055.125.162,00		22.266.459.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.33	80.50	17.737.755.549,00	80.60	22.906.676.520,00	80.70	21.996.223.092,00	80.80	22.055.125.162,00	80.90	22.266.459.000,00	
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				197.840.000,00		67.610.900,00		70.206.065,00		74.776.100,00		77.240.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	197.840.000,00	2	67.610.900,00	2	70.206.065,00	2	74.776.100,00	3	77.240.300,00	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17		17		17		17		17		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	13		13		13		13		13		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				181.681.000,00		14.518.800,00		14.954.300,00		15.432.900,00		15.926.700,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	181.681.000,00	2	14.518.800,00	2	14.954.300,00	2	15.432.900,00	3	15.926.700,00	
3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.485.000,00		1.485.000,00		1.485.000,00		1.485.000,00		1.485.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.485.000,00	1	1.485.000,00	1	1.485.000,00	1	1.485.000,00	1	1.485.000,00	
3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.249.000,00		1.249.000,00		1.249.000,00		1.249.000,00		1.249.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.249.000,00	1	1.249.000,00	1	1.249.000,00	1	1.249.000,00	1	1.249.000,00	
3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.665.000,00		12.412.800,00		12.785.200,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	8.665.000,00	17	12.412.800,00	17	12.785.200,00	17	15.000.000,00	17	15.000.000,00	
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.560.000,00		35.745.300,00		37.532.565,00		39.409.200,00		41.379.600,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	13	2.560.000,00	13	35.745.300,00	13	37.532.565,00	13	39.409.200,00	13	41.379.600,00	
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.522.731.310,00		15.740.202.960,00		16.989.550.250,00		18.001.561.880,00		19.074.289.600,00	
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	135	14.522.731.310,00	135	15.740.202.960,00	135	16.989.550.250,00	135	18.001.561.880,00	135	19.074.289.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13		13		13		13		13		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1		
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.431.512.310,00		15.615.095.760,00		16.864.303.400,00		17.876.161.600,00		18.948.731.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	135	14.431.512.310,00	135	15.615.095.760,00	135	16.864.303.400,00	135	17.876.161.600,00	135	18.948.731.000,00	
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.599.000,00		4.654.800,00		4.794.450,00		4.947.880,00		5.106.200,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.599.000,00	1	4.654.800,00	1	4.794.450,00	1	4.947.880,00	1	5.106.200,00	
3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				87.620.000,00		120.452.400,00		120.452.400,00		120.452.400,00		120.452.400,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	87.620.000,00	13	120.452.400,00	13	120.452.400,00	13	120.452.400,00	13	120.452.400,00	
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				45.250.000,00		47.555.000,00		375.512.300,00		48.264.200,00		48.629.500,00	
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	6	45.250.000,00	6	47.555.000,00	6	375.512.300,00	6	48.264.200,00	6	48.629.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6		6		6		6		6		
3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.250.000,00		17.555.000,00		17.906.100,00		18.264.200,00		18.629.500,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	6	15.250.000,00	6	17.555.000,00	6	17.906.100,00	6	18.264.200,00	6	18.629.500,00	
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000,00		30.000.000,00		357.606.200,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	357.606.200,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				424.916.000,00		528.220.100,00		587.303.434,00		497.603.250,00		407.590.700,00	
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	424.916.000,00	1	528.220.100,00	1	587.303.434,00	1	497.603.250,00	1	407.590.700,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	296	296		296		296		296		296		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		12		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1			1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		15.597.600,00		15.909.552,00		16.227.700,00		16.552.300,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000,00	1	15.597.600,00	1	15.909.552,00	1	16.227.700,00	1	16.552.300,00	
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.635.000,00		169.315.300,00		272.701.606,00		176.155.600,00		79.678.750,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		67.635.000,00	1	169.315.300,00	1	272.701.606,00	1	176.155.600,00	1	79.678.750,00	
3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.500.000,00		25.450.000,00		25.450.000,00		26.478.200,00		27.007.700,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	3.500.000,00	1	25.450.000,00	1	25.450.000,00	1	26.478.200,00	1	27.007.700,00	
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.060.000,00		72.358.800,00		73.805.976,00		75.282.200,00		76.787.700,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	5.060.000,00	12	72.358.800,00	1	73.805.976,00	1	75.282.200,00	1	76.787.700,00	
3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000,00		52.792.900,00		2.876.690,00		2.968.750,00		3.063.750,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	296	296	1.200.000,00	296	52.792.900,00	296	2.876.690,00	296	2.968.750,00	296	3.063.750,00	
3.27.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.900.000,00		9.978.000,00		10.177.560,00		10.381.100,00		10.588.700,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	4	3.900.000,00	4	9.978.000,00	4	10.177.560,00	4	10.381.100,00	4	10.588.700,00	
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				338.621.000,00		182.727.500,00		186.382.050,00		190.109.700,00		193.911.800,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	338.621.000,00	4	182.727.500,00	4	186.382.050,00	4	190.109.700,00	4	193.911.800,00	
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				469.873.010,00		3.754.382.860,00		1.280.978.314,00		764.361.800,00		261.479.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Urusan Pemerintah Daerah														
Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	5	469.873.010,00	5	3.754.382.860,00	5	1.280.978.314,00	5	764.361.800,00	5	261.479.400,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	20		12		12		12		12			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	0		5		5		5		5			
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				77.745.000,00		243.624.800,00		100.000.000,00		102.000.000,00		52.222.700,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	20	77.745.000,00	12	243.624.800,00	12	100.000.000,00	12	102.000.000,00	12	52.222.700,00		
3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				392.128.010,00		1.054.781.360,00		500.647.740,00		149.712.900,00		153.003.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	5	392.128.010,00	5	1.054.781.360,00	5	500.647.740,00	5	149.712.900,00	5	153.003.000,00		
3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		2.455.976.700,00		680.330.574,00		512.648.900,00		56.253.700,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	0	-	5	2.455.976.700,00	5	680.330.574,00	5	512.648.900,00	5	56.253.700,00		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.369.225.981,00		1.514.464.500,00		1.619.933.015,00		1.700.569.700,00		1.785.238.150,00		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	1.369.225.981,00	4	1.514.464.500,00	4	1.619.933.015,00	4	1.700.569.700,00	4	1.785.238.150,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	924	924		924		924		924		924			
3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	1.700.000,00	4	2.000.000,00	4	2.100.000,00	4	2.205.000,00	4	2.315.250,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.366.925.981,00		1.505.264.500,00		1.610.633.015,00		1.691.164.700,00		1.775.722.900,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	924	924	1.366.925.981,00	924	1.505.264.500,00	924	1.610.633.015,00	924	1.691.164.700,00	924	1.775.722.900,00	
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				600.000,00		7.200.000,00		7.200.000,00		7.200.000,00		7.200.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	600.000,00	4	7.200.000,00	4	7.200.000,00	4	7.200.000,00	4	7.200.000,00	
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				707.919.248,00		1.254.240.200,00		1.072.739.714,00		967.988.232,00		611.991.350,00	
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	4	707.919.248,00	4	1.254.240.200,00	4	1.072.739.714,00	4	967.988.232,00	4	611.991.350,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	5		6		6		6		6		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227	239		239		239		239		239		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	0		2		2		2		2		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	5		10		10		10		10		
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				238.300.000,00		345.215.000,00		369.380.050,00		387.849.000,00		407.241.500,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227	239	238.300.000,00	239	345.215.000,00	239	369.380.050,00	239	387.849.000,00	239	407.241.500,00	
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.500.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	5	5.500.000,00	10	20.000.000,00	10	21.000.000,00	10	22.050.000,00	10	23.152.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-		6.700.000,00		7.035.000,00		7.386.750,00		7.756.500,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	0	-	2	6.700.000,00	2	7.035.000,00	2	7.386.750,00	2	7.756.500,00	
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				456.319.248,00		874.135.200,00		655.324.664,00		528.246.500,00		154.658.800,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	4	456.319.248,00	4	874.135.200,00	4	655.324.664,00	4	528.246.500,00	4	154.658.800,00	
3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.800.000,00		8.190.000,00		20.000.000,00		22.455.982,00		19.182.050,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	5	7.800.000,00	6	8.190.000,00	6	20.000.000,00	6	22.455.982,00	6	19.182.050,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.619.616.400,00		2.788.277.946,00		2.998.559.471,00		3.248.178.700,00		3.380.573.200,00	
Meningkatnya kunjungan layanan edukasi teknologi pertanian di TTP Nglanggeran	Jumlah pengunjung Taman Teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran	1500	1950	188.217.000,00	2150	203.314.700,00	2250	243.977.640,00	2350	292.773.200,00	2450	295.700.900,00	
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.631.333.600,00		1.751.875.890,00		1.933.838.598,00		2.154.193.300,00		2.272.858.300,00	
Laporan Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	0	4	188.217.000,00	4	203.314.700,00	4	243.977.640,00	4	292.773.200,00	4	295.700.900,00	
3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan				188.217.000,00		203.314.700,00		243.977.640,00		292.773.200,00		295.700.900,00	
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	0	4	188.217.000,00	4	203.314.700,00	4	243.977.640,00	4	292.773.200,00	4	295.700.900,00	
Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak	1557536	1559872	988.282.800,00	1562209	1.036.402.056,00	1565324	1.064.720.873,00	1569218	1.093.985.400,00	1573890	1.107.714.900,00	
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				758.750.000,00		783.376.200,00		799.043.724,00		815.024.500,00		823.174.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	16	4	758.750.000,00	4	783.376.200,00	4	799.043.724,00	4	815.024.500,00	4	823.174.800,00	
3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				758.750.000,00		783.376.200,00		799.043.724,00		815.024.500,00		823.174.800,00	
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	16	4	758.750.000,00	4	783.376.200,00	4	799.043.724,00	4	815.024.500,00	4	823.174.800,00	
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				229.532.800,00		253.025.856,00		265.677.149,00		278.960.900,00		284.540.100,00	
Laporan Pengawasan Produksi dan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	4	4	179.357.800,00	4	201.847.356,00	4	211.939.724,00	4	222.536.600,00	4	226.987.400,00	
	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1	4		4		4		4		4		
3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				11.500.000,00		21.181.200,00		22.240.260,00		23.352.200,00		23.819.300,00	
Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1	4	11.500.000,00	4	21.181.200,00	4	22.240.260,00	4	23.352.200,00	4	23.819.300,00	
3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				167.857.800,00		180.666.156,00		189.699.464,00		199.184.400,00		203.168.100,00	
Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	4	4	167.857.800,00	4	180.666.156,00	4	189.699.464,00	4	199.184.400,00	4	203.168.100,00	
Laporan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	8	4	50.175.000,00	4	51.178.500,00	4	53.737.425,00	4	56.424.300,00	4	57.552.700,00	
3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				50.175.000,00		51.178.500,00		53.737.425,00		56.424.300,00		57.552.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	8	4	50.175.000,00	4	51.178.500,00	4	53.737.425,00	4	56.424.300,00	4	57.552.700,00	
Meningkatnya produksi Perkebunan dan Hortikultura	Produksi perkebunan dan hortikultura	37303.13	42695.1	733.964.700,00	42838.49	774.885.900,00	42942.11	863.722.770,00	43046.45	963.712.900,00	43151.52	1.045.376.800,00	
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.631.333.600,00		1.751.875.890,00		1.933.838.598,00		2.154.193.300,00		2.272.858.300,00	
Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	0	4	733.964.700,00	4	774.885.900,00	4	863.722.770,00	4	963.712.900,00	4	1.045.376.800,00	
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	4		4		4		4		4		
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				632.963.100,00		661.403.100,00		727.543.410,00		800.297.700,00		880.327.500,00	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	4	632.963.100,00	4	661.403.100,00	4	727.543.410,00	4	800.297.700,00	4	880.327.500,00	
3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura				101.001.600,00		113.482.800,00		136.179.360,00		163.415.200,00		165.049.300,00	
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	0	4	101.001.600,00	4	113.482.800,00	4	136.179.360,00	4	163.415.200,00	4	165.049.300,00	
Meningkatnya produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan	1184277.54	1325667.95	189.845.000,00	1328251.93	229.337.990,00	1331564.00	275.205.588,00	1334891.94	330.246.600,00	1339000.49	363.296.200,00	
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.631.333.600,00		1.751.875.890,00		1.933.838.598,00		2.154.193.300,00		2.272.858.300,00	
Laporan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	4	117.100.000,00	4	120.613.000,00	4	144.735.600,00	4	173.682.700,00	4	175.419.500,00	
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				117.100.000,00		120.613.000,00		144.735.600,00		173.682.700,00		175.419.500,00	
Tertelaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	4	117.100.000,00	4	120.613.000,00	4	144.735.600,00	4	173.682.700,00	4	175.419.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Laporan Pengawasan penggunaan pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	0	4	72.745.000,00	4	108.724.990,00	4	130.469.988,00	4	156.563.900,00	4	187.876.700,00	
3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				72.745.000,00		108.724.990,00		130.469.988,00		156.563.900,00		187.876.700,00	
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	0	4	72.745.000,00	4	108.724.990,00	4	130.469.988,00	4	156.563.900,00	4	187.876.700,00	
Tersedianya benih padi bersertifikat secara berkelanjutan di balai benih pertanian	Produksi benih padi bersertifikat balai benih pertanian	12000	12000	519.306.900,00	12000	544.337.300,00	12000	550.932.600,00	12000	567.460.600,00	12000	568.484.400,00	
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.631.333.600,00		1.751.875.890,00		1.933.838.598,00		2.154.193.300,00		2.272.858.300,00	
Benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	12	12	519.306.900,00		544.337.300,00		550.932.600,00		567.460.600,00		568.484.400,00	
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				519.306.900,00		544.337.300,00		550.932.600,00		567.460.600,00		568.484.400,00	
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	12	12	519.306.900,00		544.337.300,00		550.932.600,00		567.460.600,00		568.484.400,00	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				732.586.800,00		1.585.085.700,00		2.007.687.485,00		2.232.270.000,00		2.040.347.100,00	
Meningkatnya prasarana perkebunan dan hortikultura yang dapat digunakan dengan baik	Persentase prasarana perkebunan dan hortikultura yang dapat digunakan dengan baik	83	83.54	522.679.600,00	83.75	982.628.000,00	83.95	1.000.106.900,00	84.15	1.119.310.300,00	84.34	1.025.128.300,00	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				559.669.600,00		685.085.700,00		707.687.485,00		732.270.000,00		740.347.100,00	
Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4	4	522.679.600,00	4	582.628.000,00	4	600.106.900,00	4	619.310.300,00	4	625.128.300,00	
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				522.679.600,00		582.628.000,00		600.106.900,00		619.310.300,00		625.128.300,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4	4	522.679.600,00	4	582.628.000,00	4	600.106.900,00	4	619.310.300,00	4	625.128.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				172.917.200,00		900.000.000,00		1.300.000.000,00		1.500.000.000,00		1.300.000.000,00	
Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9	0	-	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	500.000.000,00	2	400.000.000,00	
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				-		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		400.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9	0	-	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	500.000.000,00	2	400.000.000,00	
Meningkatnya Prasarana Peternakan yang Dapat Digunakan dengan Baik	Persentase prasarana peternakan yang dapat digunakan dengan baik	85	86	62.917.200,00	87	200.000.000,00	88	300.000.000,00	89	300.000.000,00	90	300.000.000,00	
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				172.917.200,00		900.000.000,00		1.300.000.000,00		1.500.000.000,00		1.300.000.000,00	
Pembangunan Prasarana Peternakan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	1	62.917.200,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				62.917.200,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	1	62.917.200,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
Meningkatnya prasarana tanaman pangan yang dapat digunakan dengan baik	Persentase prasarana tanaman pangan yang dapat digunakan dengan baik	87	88.5	146.990.000,00	89	402.457.700,00	89.5	707.580.585,00	90	812.959.700,00	90.5	715.218.800,00	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				559.669.600,00		685.085.700,00		707.687.485,00		732.270.000,00		740.347.100,00	
Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	22234,17	22234,17	36.990.000,00	22234,17	102.457.700,00	22234,17	107.580.585,00	22234,17	112.959.700,00	22234,17	115.218.800,00	
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di				36.990.000,00		102.457.700,00		107.580.585,00		112.959.700,00		115.218.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kabupaten/Kota														
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	22234,17	22234,17	36.990.000,00	22234,17	102.457.700,00	22234,17	107.580.585,00	22234,17	112.959.700,00	22234,17	115.218.800,00		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				172.917.200,00		900.000.000,00		1.300.000.000,00		1.500.000.000,00		1.300.000.000,00		
Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	9	1	110.000.000,00	2	300.000.000,00	2	600.000.000,00	3	700.000.000,00	4	600.000.000,00		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				110.000.000,00		300.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		600.000.000,00		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	9	1	110.000.000,00	2	300.000.000,00	2	600.000.000,00	3	700.000.000,00	4	600.000.000,00		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.569.792.800,00		1.919.399.660,00		2.015.369.643,00		2.122.988.700,00		2.135.711.200,00		
Meningkatnya pelayanan laboratorium kesehatan hewan	Persentase layanan di Laboratorium Kesehatan Hewan yang terlaksana	100	100	74.300.000,00	100	275.786.000,00	100	289.575.300,00	100	309.845.600,00	100	316.042.500,00		
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.464.012.000,00		1.734.983.600,00		1.821.732.780,00		1.918.610.900,00		1.927.246.100,00		
Laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	20	4	74.300.000,00	4	275.786.000,00	4	289.575.300,00	4	309.845.600,00	4	316.042.500,00		
3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				74.300.000,00		275.786.000,00		289.575.300,00		309.845.600,00		316.042.500,00		
Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	20	4	74.300.000,00	4	275.786.000,00	4	289.575.300,00	4	309.845.600,00	4	316.042.500,00		
Meningkatnya pelayanan pusat kesehatan hewan	Persentase layanan di Pusat Kesehatan Hewan yang terlaksana	100	100	1.389.712.000,00	100	1.459.197.600,00	100	1.532.157.480,00	100	1.608.765.300,00	100	1.611.203.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.464.012.000,00		1.734.983.600,00		1.821.732.780,00		1.918.610.900,00		1.927.246.100,00	
Laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	77	4	1.389.712.000,00	4	1.459.197.600,00	4	1.532.157.480,00	4	1.608.765.300,00	4	1.611.203.600,00	
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1.389.712.000,00		1.459.197.600,00		1.532.157.480,00		1.608.765.300,00		1.611.203.600,00	
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	77	4	1.389.712.000,00	4	1.459.197.600,00	4	1.532.157.480,00	4	1.608.765.300,00	4	1.611.203.600,00	
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100	100	105.780.800,00	100	184.416.060,00	100	193.636.863,00	100	204.377.800,00	100	208.465.100,00	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				66.995.000,00		80.508.120,00		84.533.526,00		88.760.300,00		90.535.400,00	
Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	8	4	66.995.000,00	4	80.508.120,00	4	84.533.526,00	4	88.760.300,00	4	90.535.400,00	
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				66.995.000,00		80.508.120,00		84.533.526,00		88.760.300,00		90.535.400,00	
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	8	4	66.995.000,00	4	80.508.120,00	4	84.533.526,00	4	88.760.300,00	4	90.535.400,00	
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				11.085.000,00		53.479.920,00		56.153.916,00		58.961.600,00		60.140.800,00	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	11	6	11.085.000,00	7	53.479.920,00	8	56.153.916,00	9	58.961.600,00	10	60.140.800,00	
3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				11.085.000,00		53.479.920,00		56.153.916,00		58.961.600,00		60.140.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	11	6	11.085.000,00	7	53.479.920,00	8	56.153.916,00	9	58.961.600,00	10	60.140.800,00	
3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				27.700.800,00		50.428.020,00		52.949.421,00		56.655.900,00		57.788.900,00	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	5	5	27.700.800,00	6	50.428.020,00	7	52.949.421,00	8	56.655.900,00	9	57.788.900,00	
3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha				27.700.800,00		50.428.020,00		52.949.421,00		56.655.900,00		57.788.900,00	
Laksanakan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	5	5	27.700.800,00	6	50.428.020,00	7	52.949.421,00	8	56.655.900,00	9	57.788.900,00	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				138.554.500,00		298.737.400,00		593.674.270,00		335.631.400,00		342.344.100,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura	Persentase bencana perkebunan dan hortikultura yang tertangani	100	100	93.186.500,00	100	135.750.000,00	100	142.537.500,00	100	152.515.100,00	100	155.565.400,00	
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				138.554.500,00		298.737.400,00		593.674.270,00		335.631.400,00		342.344.100,00	
Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0	8	93.186.500,00	8	135.750.000,00	8	142.537.500,00	8	152.515.100,00	8	155.565.400,00	
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				93.186.500,00		135.750.000,00		142.537.500,00		152.515.100,00		155.565.400,00	
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0	8	93.186.500,00	8	135.750.000,00	8	142.537.500,00	8	152.515.100,00	8	155.565.400,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Tanaman Pangan	Persentase bencana tanaman pangan yang tertangani	100	100	45.368.000,00	100	162.987.400,00	100	451.136.770,00	100	183.116.300,00	100	186.778.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				138.554.500,00		298.737.400,00		593.674.270,00		335.631.400,00		342.344.100,00	
Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10	12	45.368.000,00	12	162.987.400,00	15	451.136.770,00	15	183.116.300,00	15	186.778.700,00	
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				45.368.000,00		162.987.400,00		451.136.770,00		183.116.300,00		186.778.700,00	
Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10	12	45.368.000,00	12	162.987.400,00	15	451.136.770,00	15	183.116.300,00	15	186.778.700,00	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				8.170.000,00		19.170.000,00		20.128.500,00		21.537.400,00		22.614.300,00	
Meningkatnya Usaha Peternakan yang Telah Memiliki Izin Usaha	Persentase usaha peternakan yang sudah memiliki NIB	100	100	8.170.000,00	100	19.170.000,00	100	20.128.500,00	100	21.537.400,00	100	22.614.300,00	
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.170.000,00		19.170.000,00		20.128.500,00		21.537.400,00		22.614.300,00	
Laporan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1	4	8.170.000,00	4	19.170.000,00	4	20.128.500,00	4	21.537.400,00	4	22.614.300,00	
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				8.170.000,00		19.170.000,00		20.128.500,00		21.537.400,00		22.614.300,00	
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1	4	8.170.000,00	4	19.170.000,00	4	20.128.500,00	4	21.537.400,00	4	22.614.300,00	
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				4.771.032.000,00		344.592.000,00		361.821.600,00		379.912.600,00		398.908.500,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian	Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis	124	128	4.771.032.000,00	131	344.592.000,00	134	361.821.600,00	137	379.912.600,00	140	398.908.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				4.771.032.000,00		344.592.000,00		361.821.600,00		379.912.600,00		398.908.500,00	
Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	18	18	4.771.032.000,00	18	344.592.000,00	18	361.821.600,00	18	379.912.600,00	18	398.908.500,00	
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18	18		18		18		18		18		
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18	18		18		18		18		18		
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				1.895.633.000,00		123.448.900,00		129.621.345,00		136.102.400,00		142.907.500,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18	18	1.895.633.000,00	18	123.448.900,00	18	129.621.345,00	18	136.102.400,00	18	142.907.500,00	
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				2.115.599.000,00		110.002.200,00		115.502.310,00		121.277.400,00		127.341.500,00	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18	18	2.115.599.000,00	18	110.002.200,00	18	115.502.310,00	18	121.277.400,00	18	127.341.500,00	
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				759.800.000,00		111.140.900,00		116.697.945,00		122.532.800,00		128.659.500,00	
Tersedia dan Termanfaatnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	18	18	759.800.000,00	18	111.140.900,00	18	116.697.945,00	18	122.532.800,00	18	128.659.500,00	

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, terhadap visi dan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pertanian dan Pangan sebagai salah satu perangkat daerah yang ikut mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung misi ke-2 yaitu Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif dan misi ke-5 yaitu Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah dengan berpedoman pada visi dan misi, Dinas Pertanian dan Pangan menyusun sub kegiatan prioritas seperti dalam tabel 4.3 di bawah ini

Tabel 4.3.

**Daftar Subkegiatan Prioritas
Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<i>Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan</i>	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu (1) daerah Kabupate/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	
			Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga	<i>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</i>	
			Pengembangan Lumbung Mataraman	
			Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi Perkebunan dan Hortikultura	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Pengawasan penggunaan pascapanen hortikultura	
		Meningkatnya produksi tanaman pangan	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Pengawasan penggunaan pascapanen tanaman pangan	
		Tersedianya benih padi bersertifikat secara berkelanjutan di balai benih pertanian	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
		Meningkatnya kunjungan layanan edukasi teknologi pertanian di TTP Nglanggeran	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	
			Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan	
		Meningkatnya Populasi Ternak	<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	
			<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya prasarana perkebunan dan hortikultura yang dapat digunakan dengan baik	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
		Meningkatnya prasarana tanaman pangan yang dapat digunakan dengan baik	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
		Meningkatnya prasarana perkebunan dan hortikultura yang dapat digunakan dengan baik	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
		Meningkatnya prasarana peternakan yang dapat digunakan dengan baik	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
		Meningkatnya prasarana tanaman pangan yang dapat digunakan dengan baik	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditangani	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	
			Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
			<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</i>	
			Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
		Meningkatnya pelayanan laboratorium kesehatan hewan	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
		Meningkatnya pelayanan pusat kesehatan hewan	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
8	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Tanaman Pangan	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Usaha Peternakan yang Telah Memiliki Izin Usaha	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
10	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas Sdm Pertanian	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa	
			Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola pemerintah Perangkat Daerah	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			<i>Administrasi Keuangan</i>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			<i>Administrasi Umum Perangkat</i>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang</i>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
			Pemeliharaan aset tetap lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD ditampilkan dalam tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indikator Kinerja Utama								
1	Nilai PDRB ADHK pertanian sub kategori tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Rp	2.635.306.433.739	2.682.555.247.135	2.730.651.191.755	2.779.609.455.947	2.829.445.500.369	2.880.175.062.878	
2	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ton	1.347.371,93	1.368.363,05	1.371.090,42	1.374.506,11	1.377.938,39	1.382.152,01	
3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	8,05-8,40	7,61-7,96	7,17-7,52	6,73-7,08	6,29-6,64	5,85-6,20	
4	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Produksi Daging	Ton	8.597,65	8.632,04	8.683,83	8.774,62	8.810,21	8.880,69	
6	Jumlah Produksi Telur	Ton	8.416,56	8.458,64	8.517,85	8.590,25	8.671,86	8.757,58	
	Indikator Kinerja Daerah								
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83,30	83,63	83,96	84,29	84,62	84,95	

Selain Indikator Kinerja utama, Dinas Pertanian dan Pangan juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mewakili pencapaian program. Indikator Kinerja Kunci di Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Pangan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2.09 - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								
	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	58.50	60.08	61.67	63.26	64.84	66.43	
2	3.27 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	124,42	-8	-8,7	-9,52	-10,53	-11,76	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	721,11	732,08	733,14	734,08	735,04	736,20	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan memuat kebijakan dan pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis untuk dijadikan acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka RENSTRA dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam bentuk usulan program dan kegiatan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Pemerintah kabupaten Gunungkidul.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan disusun sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan (Renja PD).

KEPALA,

RISMIYADI

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
1	Nilai PDRB ADHK pertanian sub kategori tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Rp	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah yang dihitung dengan harga pada tahun dasar tertentu. Tahun Dasar terbaru yang digunakan adalah 2010. PDRB ADHK menggambarkan nilai riil dan berguna untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.	Akumulasi nilai PDRB ADHK pertanian sub kategori tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	<p>Nilai PDRB ADHK dalam Rp mencerminkan kontribusi riil (nyata) subkategori pertanian terhadap perekonomian regional, setelah disesuaikan dengan harga konstan.</p> <p>Pertumbuhan Riil: Jika PDRB ADHK salah satu sub kategori meningkat dari tahun sebelumnya, berarti ada peningkatan produksi fisik riil (bukan karena kenaikan harga), menunjukkan efisiensi atau ekspansi sektor.</p> <p>Perbandingan dan Kebijakan: Nilai rendah pada salah satu sub kategori bisa menandakan ketergantungan pada impor atau kendala seperti serangan OPT/ penyakit hewan, sehingga perlu intervensi kebijakan</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ton	<p>Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan merujuk pada jumlah hasil produksi (dalam satuan fisik ton) yang dihasilkan dari kegiatan pertanian dalam suatu periode tertentu, (triwulan/ subround/ tahunan), di wilayah tertentu.</p> <p>Tanaman Pangan: Kegiatan budidaya tanaman pangan tahunan atau semusim seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu. Produksi diukur sebagai jumlah panen (hasil bersih setelah panen) dalam satuan berat (ton) dari lahan yang diolah, baik sawah, tegalan, maupun ladang.</p> <p>Hortikultura: Kegiatan produksi tanaman hortikultura (cabe, bawang merah, pisang, durian, alpukat dan mangga). Produksi diukur sebagai jumlah hasil panen dalam satuan berat (ton atau kuintal) dari kegiatan budidaya intensif.</p>	Total produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubikayu) + tanaman hortikultura (cabe, bawang merah, pisang, durian, alpukat, mangga) + tanaman perkebunan (kakao, mete, tembakau, kelapa) dalam setahun	<p>Tinggi: Menunjukkan wilayah tersebut surplus pangan/ kawasan produksi dan berpotensi mendukung ketahanan pangan</p> <p>Rendah: Mengindikasikan kendala seperti lahan terbatas, kurangnya infrastruktur, rendahnya produktivitas, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada wilayah lain.</p> <p>Tren Naik/Turun: Kenaikan menandakan permintaan pasar meningkat (misalnya buah tropis untuk ekspor). Penurunan bisa karena hama (misalnya OPT pada cabai) atau perubahan pola konsumsi.</p>	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
			<p>Perkebunan: Kegiatan produksi tanaman tahunan atau menahun seperti kakao, mete, tembakau dan kelapa. Produksi diukur sebagai jumlah hasil panen dalam satuan berat (ton) dari perkebunan rakyat.</p>				

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	<ul style="list-style-type: none"> Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya 	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) d(x)$ <p>Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.</p> <p>MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement).</p> <p>f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu</p>	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional	
4	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	Perbandingan antara jumlah kasus penyakit hewan menular yang ditangani dengan jumlah kasus penyakit yang dilaporkan	(Jumlah kasus penyakit hewan menular yang ditangani / jumlah kasus penyakit yang dilaporkan) x 100	Semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi jumlah kasus penyakit hewan menular yang ditangani	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
5	Jumlah Produksi Daging	Ton	Jumlah produksi daging pada tahun ke n	Angka kumulatif produksi laporan statistik peternakan untuk daging sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi pada tahun ke n	Semakin tinggi angka kumulatif semakin tinggi jumlah produksi daging	Dinas Pertanian dan Pangan	
6	Jumlah Produksi Telur	Ton	Jumlah produksi telur pada tahun ke n	Angka kumulatif produksi laporan statistik peternakan untuk telur ayam buras, ayam ras petelur, telur itik dan telur puyuh pada tahun ke n	Semakin tinggi angka kumulatif semakin tinggi jumlah produksi telur	Dinas Pertanian dan Pangan	
B	INDIKATOR KINERJA DAERAH						
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota).	<p>indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah atau negara berdasarkan beberapa dimensi, seperti ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan</p> <p>Metode perhitungan Merujuk kepada Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA</p>	<p>IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah (kabupaten/kota) dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas 6 (Sangat Tahan)</p> <p>Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan</p>	Badan Pangan Nasional	
C	INDIKATOR KINERJA KUNCI						
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	Perbandingan antara jumlah cadangan/persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah (CBPK) dengan Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan adalah jumlah target cadangan/persediaan beras pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Target Cadangan Beras Pemerintah/Kabupaten 125,73 ton. Perhitungan berdasar Peraturan Badan Pangan Nasional No 15 Tahun 2023 tentang Tatacara perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah.	Persentase Ketersediaan Pangan=(Jumlah CBPK)/(Jumlah target CPP kab) x 100	Persentase ketersediaan pangan mencerminkan tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah, khususnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar beras dan jagung sebagai sumber karbohidrat utama Surplus: Cadangan pangan (beras/jagung) melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat. Cukup: Cadangan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tanpa surplus atau defisit. Defisit: Cadangan pangan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, menandakan kerentanan ketahanan pangan.	Dinas Pertanian dan Pangan	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	Perbandingan antara jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular pada tahun ke n dikurangi jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular pada tahun n-1 dengan jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular pada tahun n-1	$\{(Jumlah\ kejadian\ kasus\ penyakit\ hewan\ menular\ pada\ tahun\ ke\ n - jumlah\ kejadian\ kasus\ penyakit\ hewan\ menular\ pada\ tahun\ n-1) / jumlah\ kejadian\ kasus\ penyakit\ hewan\ menular\ pada\ tahun\ n-1\} \times 100$	Semakin rendah nilai persentase semakin tinggi jumlah penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	Perbandingan antara Jumlah hasil produksi tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, talas dan shorghum dalam satuan per hektar, dengan Luas tanaman pangan yang dapat dipanen dalam satuan hektar.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun $= (\text{Jumlah Produksi pertanian per hektar pertahun}) / (\text{luas panen}) \times 100$	Produktivitas pertanian per hektar per tahun mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan lahan, teknologi pertanian, dan faktor pendukung seperti irigasi, pupuk, atau varietas unggul. Interpretasi nilai produktivitas bergantung pada komoditas, wilayah, dan standar regional. Tinggi: Menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan lahan, biasanya akibat adopsi teknologi modern (misalnya benih unggul, irigasi drip, atau mekanisasi), pengelolaan lahan yang baik, atau kondisi agroekologi yang mendukung (misalnya tanah subur, curah hujan ideal). Sedang: Produktivitas cukup baik tetapi belum optimal, biasanya karena keterbatasan teknologi, irigasi, atau kualitas input (misalnya pupuk, benih). Wilayah ini memenuhi kebutuhan lokal tetapi tidak surplus signifikan.	Dinas Pertanian dan Pangan	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
					<p>Rendah: Menunjukkan inefisiensi penggunaan lahan, sering akibat keterbatasan teknologi, lahan marginal, serangan hama/penyakit, atau kekurangan air. Wilayah ini berisiko mengalami defisit pangan</p>		

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRET ASI	SUMBE R DATA
A	URUSAN PANGAN					
1	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat dalam suatu wilayah, berdasarkan kontribusi energi (kalori) dan protein dari berbagai kelompok pangan.	PPH dihitung berdasarkan konsumsi energi (kkal/orang/hari) dan protein (gram/orang/hari) dari 8 kelompok pangan utama: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan sayur, kacang-kacangan, gula, serta biji-bijian dan produk olahannya, dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)	PPH Tinggi (80-100) : Pola konsumsi pangan mendekati ideal, dengan asupan energi dan protein yang seimbang dari berbagai kelompok pangan. Masyarakat mengonsumsi pangan yang beragam, termasuk sumber karbohidrat (padi-padian, umbi), protein (hewani, kacang-kacangan), serta mikronutrien dari buah dan sayur. Menunjukkan ketahanan pangan yang	BPS

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
					<p>baik dari sisi pemanfaatan, dengan risiko kekurangan gizi rendah.</p> <p>PPH Sedang (60-79) : Pola konsumsi cukup beragam tetapi belum ideal. Biasanya didominasi oleh padi-padian (misalnya nasi) dengan konsumsi pangan hewani, buah, atau sayur yang terbatas, sering akibat keterbatasan daya beli atau akses pasar.</p> <p>PPH Rendah (<60) : Pola konsumsi</p>	

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
					<p>tidak seimbang, sangat bergantung pada satu kelompok pangan (biasanya padi-padian seperti beras atau jagung), dengan konsumsi pangan hewani, buah, dan sayur sangat minim. Ini menunjukkan kerentanan gizi</p>	

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
2	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	Indikator yang menunjukkan proporsi wilayah (Kalurahan) dalam suatu Kabupaten yang diklasifikasikan sebagai "rentan rawan pangan" berdasarkan kriteria ketahanan pangan	<p>dihitung menggunakan kerangka Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), untuk Kalurahan yang masuk kategori sangat rentan, rentan dan agak rentan</p> <p>Persentase daerah rentan rawan pangan dihitung sebagai: $\left(\frac{\text{Jumlah Kalurahan Rentan Rawan Pangan}}{\text{Total Jumlah Kalurahan}} \right) \times 100\%$</p>	<p>Persentase Tinggi (>30%): Sebagian besar daerah dalam wilayah tersebut menghadapi masalah ketahanan pangan. Memiliki kombinasi produksi pangan rendah, kemiskinan tinggi, gizi buruk, atau kerentanan terhadap bencana.</p> <p>Persentase Sedang (10–30%): Sebagian daerah menghadapi</p>	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
					<p>kerentanan pangan, tetapi tidak dominan. Masalah rawan pangan biasanya terpusat di wilayah tertentu</p> <p>Persentase Rendah (<10%): Hanya sedikit daerah yang rawan pangan, menunjukkan ketahanan pangan yang kuat di sebagian besar wilayah</p>	
3	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
	Meningkatnya pengawasan dan mutu keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	proporsi produk pangan segar (seperti buah, sayur, daging, ikan, dan telur) yang lolos uji keamanan pangan berdasarkan standar nasional (SNI)	Persentase pangan segar yang memenuhi keamanan pangan = (Jumlah pangan segar lolos uji / total pangan segar yang diuji) x 100%	Semakin tinggi persentase bahan pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan menunjukkan efektifitas pengawasan, penerapan GAP	Dinas Pertanian dan Pangan
B	URUSAN KEBUDAYAAN					
1	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap pengembangan (%)	indikator yang mengukur peningkatan kapasitas, fungsi, atau dampak program Lumbung Mataraman dalam tahap pengembangan dibandingkan dengan tahap sebelumnya (tahap penumbuhan) atau periode awal pelaksanaan	<p>Persentase peningkatan dihitung dengan membandingkan jumlah unit pada tahap pengembangan dengan jumlah unit pada periode sebelumnya (tahap penumbuhan atau baseline)</p> <p>Persentase Peningkatan = Jumlah unit tahap pengembangan / jumlah unit tahap sebelumnya x 100%</p>	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap pengembangan mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal	Dinas Pertanian dan Pangan
C	URUSAN PERTANIAN					
1	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien	<p>Nilai AKIP dihitung sebagai skor komposit dari empat komponen evaluasi, dengan bobot masing-masing sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021</p> <p>Nilai AKIP=(0,30×SPerencanaan)+(0,30×SPengukuran)+(0,15×SPelaporan)+(0,25×SEvaluasi Internal)</p>	<p>Nilai Tinggi (AA atau A, >80) : Perangkat daerah memiliki akuntabilitas kinerja yang sangat baik atau memuaskan, dengan perencanaan yang selaras dengan tujuan pembangunan, pengukuran kinerja yang akurat hingga level eselon rendah, pelaporan yang tepat waktu, dan evaluasi internal yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Penggunaan anggaran</p>	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
					<p>efektif dan efisien, menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.</p> <p>Nilai Sedang (BB atau B, 60–80): Perangkat daerah memiliki akuntabilitas kinerja yang baik hingga sangat baik pada sebagian unit kerja, tetapi masih ada kekurangan dalam perencanaan, pengukuran, atau evaluasi internal. Penggunaan anggaran cukup efisien, tetapi belum sepenuhnya</p>	

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
					berdampak maksimal. Nilai Rendah (CC, C, atau D, <60): Akuntabilitas kinerja perangkat daerah kurang memadai hingga sangat buruk, dengan sistem SAKIP yang tidak andal, perencanaan yang lemah, atau minimnya tindak lanjut evaluasi. Penggunaan anggaran cenderung tidak efisien, dengan dampak terbatas bagi masyarakat.	

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
2	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Meningkatnya kunjungan layanan edukasi teknologi pertanian di TTP Nglanggeran	Jumlah pengunjung Taman Teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran (Orang)	jumlah individu (dalam satuan orang) yang mengunjungi TTP Nglanggeran, dalam periode tertentu (tahunan).	Jumlah pengunjung dihitung secara langsung sebagai total individu yang tercatat mengunjungi TTP Nglanggeran selama 1 tahun	Jumlah pengunjung TTP Nglanggeran mencerminkan tingkat popularitas, daya tarik, sebagai destinasi agroeduwisata, serta kontribusinya terhadap PAD	Dinas Pertanian dan Pangan
	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)	Jumlah populasi ternak pada tahun ke n	Angka komulatif populasi laporan statistik peternakan untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas pada tahun ke n	Semakin tinggi angka komulatif semakin tinggi jumlah populasi ternak	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
	Meningkatnya produksi Perkebunan dan Hortikultura	Produksi perkebunan dan hortikultura (Ton)	Merujuk pada total hasil produksi komoditas perkebunan strategis (kelapa, kakao, tembakau, dan mete) dan hortikultura (bawang merah, cabe, alpukat, durian, pisang, mangga) yang diukur dalam satuan ribu ton.	<p>Produksi Perkebunan Produksi Total = Jumlah luas areal panen x produktivitas</p> <p>Produksi Hortikultura sayur Produksi Total = Jumlah luas areal panen x produktivitas</p> <p>Produksi Hortikultura buah Produksi Total = Jumlah tanaman menghasilkan x produktivitas per tanaman</p>	<p>Tinggi: Produksi tinggi menunjukkan keberhasilan pengelolaan perkebunan dan hortikultura</p> <p>Sedang : Produksi stabil tetapi menghadapi tantangan seperti perubahan iklim</p> <p>Rendah : Produksi rendah akibat alih fungsi lahan atau produktivitas rendah.</p>	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan (Ton)	total hasil produksi komoditas tanaman pangan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu, yang diukur dalam satuan ton. Produksi dihitung berdasarkan luas panen (hektare) dan produktivitas (ton/ha), yang dikumpulkan melalui Survei Kerangka Sampel Area (KSA) dan Survei Ubinan oleh BPS.	Produksi tanaman pangan dihitung dengan rumus berikut: Produksi Total = luas panen x produktivitas	Tinggi: Produksi tinggi menunjukkan keberhasilan pengelolaan tanaman pangan Sedang : Produksi stabil tetapi menghadapi tantangan seperti perubahan iklim Rendah : Produksi rendah akibat alih fungsi lahan atau produktivitas rendah.	Dinas Pertanian dan Pangan
	Tersedianya benih padi bersertifikat secara berkelanjutan di balai benih pertanian	Produksi benih padi bersertifikat balai benih pertanian (Kg)	jumlah benih padi (dalam ton) yang dihasilkan oleh UPT Balai Benih Pertanian, yang telah melalui	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/ benih yang diperbanyak UPT Balai Benih Pertanian	Produksi Tinggi (>1 juta ton benih bersertifikat) Produksi Sedang (~500.000-1	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
			proses sertifikasi sesuai aturan yang berlaku		juta ton) Produksi Rendah (<500.000 ton)	
3	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Meningkatnya prasarana perkebunan dan hortikultura yang dapat digunakan dengan baik	Persentase prasarana perkebunan dan hortikultura yang dapat digunakan dengan baik (%)	Perbandingan antara jumlah prasarana perkebunan dan hortikultura yang dapat digunakan dengan baik pada tahun ke n dengan jumlah keseluruhan prasarana perkebunan dan hortikultura yang ada pada tahun ke n	Jumlah prasarana perkebunan dan hortikultura yang dapat digunakan dengan baik pada tahun ke n dibagi dengan jumlah keseluruhan prasarana perkebunan dan hortikultura yang ada pada tahun ke n dikali 100 %	Semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi jumlah prasarana perkebunan dan hortikultura yang dapat digunakan dengan baik	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
	Perbandingan antara jumlah prasarana peternakan yang dapat digunakan dengan baik pada tahun ke n dengan jumlah keseluruhan prasarana peternakan yang ada pada tahun ke n	Persentase prasarana peternakan yang dapat digunakan dengan baik (%)	Perbandingan antara jumlah prasarana peternakan yang dapat digunakan dengan baik pada tahun ke n dengan jumlah keseluruhan prasarana peternakan yang ada pada tahun ke n	Jumlah prasarana peternakan yang dapat digunakan dengan baik pada tahun ke n dibagi dengan jumlah keseluruhan prasarana peternakan yang ada pada tahun ke n dikali 100 %	Semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi jumlah prasarana peternakan yang dapat digunakan dengan baik	Dinas Pertanian dan Pangan
	Meningkatnya prasarana tanaman pangan yang dapat digunakan dengan baik	Persentase prasarana tanaman pangan yang dapat digunakan dengan baik (%)	Perbandingan antara jumlah prasarana tanaman pangan yang dapat digunakan dengan baik pada tahun ke n dengan jumlah keseluruhan prasarana tanaman pangan yang ada pada tahun ke n	Jumlah prasarana tanaman pangan yang dapat digunakan dengan baik pada tahun ke n dibagi dengan jumlah keseluruhan prasarana tanaman pangan yang ada pada tahun ke n dikali 100 %	Semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi jumlah prasarana tanaman pangan yang dapat digunakan dengan baik	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
4	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
	Meningkatnya pelayanan laboratorium kesehatan hewan	Persentase layanan di Laboratorium Kesehatan Hewan yang terlaksana (%)	Perbandingan antara jumlah layanan di Laboratorium Kesehatan Hewan yang terlaksana pada tahun ke n dengan jumlah layanan yang terdata pada tahun ke n	Jumlah layanan di Laboratorium Kesehatan Hewan yang terlaksana pada tahun ke n dibagi dengan jumlah layanan yang terdata pada tahun ke n dikali 100 %	Semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi jumlah layanan di Laboratorium Kesehatan Hewan yang terlaksana	Dinas Pertanian dan Pangan
	Meningkatnya pelayanan pusat kesehatan hewan	Persentase layanan di Pusat Kesehatan Hewan yang terlaksana (%)	Perbandingan antara jumlah layanan di Pusat Kesehatan Hewan yang terlaksana pada tahun ke n dengan jumlah layanan yang terdata pada tahun ke n	Jumlah layanan di Pusat Kesehatan Hewan yang terlaksana pada tahun ke n dibagi dengan jumlah layanan yang terdata pada tahun ke n dikali 100 %	Semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi jumlah layanan di Pusat Kesehatan Hewan yang terlaksana	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	Perbandingan antara jumlah wilayah yang sudah terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada tahun ke n dengan jumlah wilayah di kabupaten Gunungkidul	Jumlah wilayah yang sudah terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada tahun ke n dibagi dengan jumlah wilayah di kabupaten Gunungkidul dikali 100 %	Semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi jumlah wilayah yang sudah terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dinas Pertanian dan Pangan
5	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura	Persentase bencana perkebunan dan hortikultura yang tertangani (%)	Persentase bencana perkebunan dan hortikultura yang tertangani mengacu luas area yang terkena Dampak Perubahan Iklim/DPI, banjir, kekeringan,	Jumlah luas bencana perkebunan dan hortikultura (DPI dan/atau OPT) yang tertangani dibagi jumlah total luas lahan yang terkena bencana (DPI dan/atau OPT) dikali 100 %	Semakin tinggi kejadian bencana (DPI dan/atau OPT) yang berhasil ditangani menunjukkan koordinasi yang baik antara dinas dan petani dan	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
			dan bencana serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan/OP T yang berhasil ditangani (melalui mitigasi, pengendalian, atau pemulihan sehingga tidak menyebabkan kerugian total/puso)		efektivitas respons terhadap DPI dan/atau OPT untuk menjaga produktivitas sektor perkebunan dan hortikultura	
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Tanaman Pangan	Persentase bencana tanaman pangan yang tertangani (%)	Persentase bencana tanaman pangan yang tertangani mengacu luas area yang terkena bencana serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan/OP T dan Dampak Perubahan Iklim/DPI, banjir, kekeringan yang berhasil ditangani	Jumlah luas bencana tanaman pangan (DPI dan/atau OPT) yang tertangani dibagi jumlah total luas lahan yang terkena bencana (DPI dan/atau OPT) dikali 100 %	Semakin tinggi kejadian bencana (DPI dan/atau OPT) yang berhasil ditangani menunjukkan koordinasi yang baik antara dinas dan petani dan efektivitas respons terhadap DPI dan/atau OPT untuk menjaga	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
			(melalui mitigasi, pengendalian, atau pemulihan sehingga tidak menyebabkan kerugian total/puso)		produktivitas sektor tanaman pangan	
6	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
	Meningkatnya Usaha Peternakan yang Telah Memiliki Izin Usaha	Persentase usaha peternakan yang sudah memiliki NIB (%)	Perbandingan antara jumlah usaha peternakan yang ber NIB pada tahun ke n dengan jumlah keseluruhan usaha peternakan	Jumlah usaha peternakan yang ber NIB pada tahun ke n dibagi jumlah keseluruhan usaha peternakan dikali 100 %	Semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi jumlah usaha peternakan yang ber NIB	Dinas Pertanian dan Pangan
7	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian	Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis (Kelompok)	kelompok petani yang menjalankan kegiatan usaha tani berorientasi pasar, mencakup hulu (produksi/input seperti benih, pupuk), tengah (budidaya), hingga hilir (pengolahan, pemasaran, distribusi). Pola usaha ini berfokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk	<p>Jumlah kelompok tani yang terdata melakukan kegiatan agribisnis</p> <p>Jumlah kelompok tani yang terdata melakukan kegiatan agribisnis = jumlah kelompok tani kelas utama berdasarkan hasil penilaian kelas kelompok</p>	Semakin banyak jumlah kelompok agribisnis, menunjukkan jumlah poktan/gapoktan yang telah menjalankan kegiatan usaha berorientasi pasar	Dinas Pertanian dan Pangan